

**Advokasi ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) dalam Penolakan  
Reklamasi Teluk Benoa pada tahun 2014-2020.**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

**Oleh:**

**ALIEF DANDI SYAHNAUFAL**

**18323157**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**Advokasi ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) dalam Penolakan  
Reklamasi Teluk Benoa pada tahun 2014-2020.**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**ALIEF DANDI SYAHNAUFAL**

18323157

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### Advokasi ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) dalam Penolakan Reklamasi Teluk Benoa pada tahun 2014-2020.

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

26 Juni 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



*Karina*  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

*Hadza*

*Karina*

*Gustri*

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

### Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alief Dandi Syahnaufal  
Tempat dan Tanggal Lahir : Denpasar, 16 Mei 2000  
Alamat : Jl. Nglanjaran, Candirejo, Sardonoarjo, Kec. Ngaglik,  
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581  
NIM : 18323157  
Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 9 Juni 2024

  
Alief Dandi Syahnaufal

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	iii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT .....	xix
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Cakupan Penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka .....	8
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Argumen Sementara .....	14
1.8 Metode Penelitian .....	14
1.9 Sistematika Pembahasan .....	16
BAB 2 .....	18
FORBALI DAN ADVOKASI PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA .....	18
2.1. Teluk Benoa .....	18
2.2. Pemerintah dan PT TWBI.....	20
2.2.1. Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI).....	23
2.2.2. Jaringan ForBALI dan Media Penyaluran Informasi.....	
2.3 Pro dan Kontra pada Rencana Reklamasi Teluk Benoa.....	39
2.3.1 Pro dalam Reklamasi Teluk Benoa:.....	39
2.3.2 Kontra Reklamasi Teluk Benoa:.....	40
BAB 3 .....	43
PROSES FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI (ForBALI) DALAM MENGADVOKASI PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA PADA TAHUN 2014-2020 .....	43
3.1 Conflictual Collective Action.....	43
3.2 Dense Informal Networks.....	46
3.3 Collective Identity.....	49
BAB 4 .....	59
PENUTUP .....	59

4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Rekomendasi Penelitian.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar2. 1	Gambar 2. 1 Rencana Pengembangan Pulau Pudet .....	22
Gambar2. 2	Gambar 2. 1 Rencana Pengembangan Fisherman's Cove .....	22
Gambar2. 3	Lambang Identitas Forbali .....	23
Gambar2. 4	Sesi Wawancara dengan Gede Mertadana melalui daring via Zoom .....	24
Gambar2. 5	Peninjauan Kembali dan Edukasi Bersama terkait Reklamasi di Salah Satu Desa Adat.....	25
Gambar2. 6	Profile Twitter @ForBALI13 .....	30
Gambar2. 7	Bentuk Postingan Twitter @ForBALI13 .....	30
Gambar2. 8	Profil Instagram @forbali13 .....	31
Gambar2. 9	Undangan Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa. ....	31
Gambar2. 10	Wawancara I Wayan “Gendo” Suardana selaku Koordinator Umum ForBali dengan Media Lokal Bali TV .....	32
Gambar2. 11	Profile Facebook ForBali .....	33
Gambar2. 12	Bentuk Unggahan di Facebook ForBali.....	33
Gambar2. 13	Profile YouTube ForBALI.....	34
Gambar2. 14	Isi Konten dalam Akun YouTube ForBALI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar2. 15	Beranda Website ForBali .....	36
Gambar2. 16	Surat Terbuka untuk Pemerintah Terkait Penolakan dari ForBali.....	37
Gambar2. 17	Isi Artikel dalam Website Resmi ForBali .....	37
Gambar 3. 1	Telaah Sosial Budaya Kawasan Suci Teluk Benoa .....	47
Gambar 3. 2	Aksi Greenpeace .....	49
Gambar 3. 3	Komunitas Jaringan ForBali “Leak Sanur” Melakukan Beach Clean Up. ....	51
Gambar 3. 4	Kegiatan Beach Clean Up “Leak Sanur” .....	51
Gambar 3. 5	Masyarakat Tanjung Benoa Melakukan Bersih-Bersih di Pulau Pudet.....	52
Gambar 3. 6	Penyaluran Bantuan Logistik Kepada Korban Erupsi Gunung Agung.....	53
Gambar 3. 7	Penyaluran Bantuan Logistik untuk Masyarakat Korban Erupsi Gunung Semeru .....	53
Gambar 3. 8	Penampilan Tari Barong oleh seniman lokal .....	54
Gambar 3. 9	Konser Svava Bumi sebagai wadah penyatuan komunitas dan seniman Bali.....	54
Gambar 3. 10	Komunitas Perempuan ForBali Touring dengan membawa pesan Penolakan Reklamasi Teluk Benoa .....	55

Gambar 3. 11 Contoh Pakaian Adat yang digunakan dalam aksi penolakan .....	55
Gambar 3. 12 Pakaian Adat yang menjadi pakaian pilihan untuk menolak Reklamasi Teluk Benoa .....	56

## DAFTAR SINGKATAN

**AMDAL:** Analisis Dampak Lingkungan

**BPS:** Badan Pusat Statistik

**DPD:** Dewan Perwakilan Daerah

**DPRD:** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**DPR RI:** Dewan Perwakilan Rakyat, Rakyat Indonesia

**ForBALI:** Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi

**KONTRAS:** Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

**LLPM:** Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

**LSM:** Lembaga Swadaya Masyarakat

**PERPRES:** Peraturan Presiden

**PT. TWBI:** Perseroan Terbatas Tirta Wahana Bali Internasional

**SDM:** Sumber Daya Manusia

**SK:** Surat Keputusan

**UNUD:** Universitas Udayana

**WALHI:** Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

## ABSTRAK

Pulau Bali dikenal dengan pulau pariwisata yang difasilitasi lengkap untuk para wisatawan baik itu nasional dan juga internasional. Bali juga dikenal akan kuatnya masyarakat untuk tetap berpegang teguh pada agama, adat istiadat, budaya, dan juga *Tri Hita Karana*. Kemudian pemerintah berusaha untuk membuka lahan pariwisata baru dengan membentuk sebuah peraturan perubahan alih fungsi lahan dari kawasan konservasi dan dilindungi di wilayah Teluk Benoa. Dari hal tersebut ForBali menunjukkan eksistensinya untuk menolak mega proyek yang hak pembangunannya diberikan kepada PT. Tirta Wahana Bali Internasional karena dinilai bertentangan dengan konsep *Tri Hita Karana*. ForBali mengajak seluruh masyarakat Bali untuk bersama-sama dengan berbagai upaya dan strategi rencana dalam menolak reklamasi di Teluk Benoa. Dengan menggunakan pendekatan teori *Social Movement* milik Donatella Della Porta dan Mario Diani serta menggunakan metode penelitian kualitatif seluruh proses dan upaya ForBali untuk menolak reklamasi di Teluk Benoa tersaji di dalam penelitian ini. Sejauh ini ForBali berhasil memberikan tekanan-tekanan berupa kritik, desakan, dan juga kampanye untuk menolak dengan tegas proyek Teluk Benoa.

**Kata Kunci:** Advokasi ForBali, *Social Movement*, Reklamasi Teluk Benoa

## ABSTRACT

*Bali is known as the island of tourism that is fully facilitated for both national and international tourists. Bali is also known for the strength of the community to stick to religion, customs, culture, and also Tri Hita Karana. Then the government tried to open new tourism land by forming a regulation on land use change from conservation and protected areas in the Benoa Bay area. From this, ForBali showed its existence to reject the mega project whose development rights were given to PT Tirta Wahana Bali International because it was considered contrary to the concept of Tri Hita Karana. ForBali invites all Balinese people to work together with various efforts and strategic plans in rejecting reclamation in Benoa Bay. By using Donatella Della Porta and Mario Diani's Social Movement theory approach and using qualitative research methods, the entire process and efforts of ForBali to reject reclamation in Benoa Bay are presented in this study. So far ForBali has succeeded in putting pressure in the form of criticism, pressure, and also campaigns to firmly reject the Benoa Bay project.*

**Keywords:** *ForBali Advocacy, Social Movement, Benoa Bay Reclamation*

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Reklamasi merupakan perubahan alih fungsi wilayah menjadi wilayah yang lebih produktif. Biasanya reklamasi digunakan sebagai proses pengubahan wilayah perairan laut atau pantai yang tadinya tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti industri, perumahan, atau tempat hiburan lainnya yang juga dapat digunakan masyarakat global. Menurut Sumardjo (1995), reklamasi adalah serangkaian upaya untuk mengembalikan suatu kawasan yang telah terganggu oleh kegiatan manusia ke dalam keadaan semula atau keadaan yang baru yang lebih baik, sesuai dengan tujuan penggunaannya. Menurut Samodra et al. (2013), reklamasi adalah upaya untuk mengembalikan fungsi suatu lahan yang telah terganggu akibat kegiatan manusia, sehingga dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan tujuan awal penggunaannya. Dalam prosesnya reklamasi dilakukan dengan membuang material seperti pasir atau tanah ke wilayah perairan atau pantai yang ingin diubah.. Reklamasi sendiri juga merupakan pemulihan dan pengembalian fungsi lahan yang sebelumnya dirusak oleh manusia itu sendiri seperti membangun infrastruktur di pesisir secara masif dapat merusak lingkungan sekitarnya. Tujuan dari reklamasi ini untuk mengembalikan ekologis, sosial dan ekonomi agar lebih fungsional dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak serta bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi wilayah tersebut (Sari et al., 2018).

Reklamasi juga merupakan bentuk dari kehidupan yang telah ter-modernisasi akibat dari pertumbuhan populasi yang kian padat dan melonjaknya dinamika kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Proses reklamasi yang dapat dijadikan contoh dan juga tidak asing bagi masyarakat adalah proyek reklamasi di Teluk Benoa, Bali,

yang bertujuan untuk mengubah wilayah perairan Teluk Benoa menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata. Akan tetapi proyek tersebut telah menuai banyak sekali kontroversi serta penolakan dijalanannya proyek tersebut karena banyak pihak yang menyatakan bahwa proyek ini merusak lingkungan dan mengancam mata pencaharian nelayan di sekitar wilayah tersebut. Kontroversi-kontroversi terhadap reklamasi tersebut menunjukkan bahwa reklamasi bukanlah hal yang mudah dilakukan dan harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat sekitar (Wiranata, et. al. 2020).

Reklamasi Teluk Benoa menjadi isu hangat yang sangat penting bagi warga Bali. Teluk Benoa merupakan sebuah teluk yang terletak di ujung selatan pulau Bali yang jaraknya tidak jauh dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Teluk ini dikenal sebagai salah satu kawasan pariwisata Bali yang ramai menjadi incaran para wisatawan karena memiliki pemandangan alam yang cukup menarik perhatian dengan keindahannya serta beragam fasilitas rekreasi yang memadai, seperti yacht dan juga water sports menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun, sejak tahun 2012, Teluk Benoa menjadi isu hangat bagi mata publik karena adanya proyek reklamasi yang akan merubah wajah teluk tersebut.

Bila kita tarik lagi ke belakang lebih jauh sebetulnya proses perencanaan reklamasi ini telah lebih dulu direncanakan pada tahun 1991. Proyek reklamasi pertama Teluk Benoa dimulai pada tahun 1991 ketika PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC) mengajukan perencanaan pembangunan dan pemanfaatan lahan untuk mengembangkan kawasan Teluk Benoa di Bali agar lebih produktif (Wiranata, et. al. 2020). Dan pada tahun 1994, pemerintah pada akhirnya merespon pengajuan proyek dari BTDC dengan memberikan izin reklamasi seluas 770 hektar di Teluk Benoa (Adharani et. al, 2020). Tahap pertamanya reklamasi tersebut dimulai pada tahun 1997 dan melibatkan reklamasi seluas 250 hektar untuk pembangunan dermaga dan jalan di sepanjang pantai (Wiranata, et. al. 2020).

Pada tahun 2003, BTDC mengajukan perubahan rencana pembangunan infrastruktur yang meliputi pengembangan dan pemanfaatan area seluas 800 hektar serta penambahan 11 hotel (Adharani et. al. 2020). Namun, proyek reklamasi Teluk Benoa menuai banyaknya penolakan dari masyarakat Bali yang merasa keberadaan proyek tersebut akan merusak lingkungan dan budaya Bali (Pebriyanti, et. al. 2012-2018). Meskipun mendapat banyak penolakan dari masyarakat, proyek reklamasi Teluk Benoa tetap dijalankan hingga saat ini. Pada tahun 2014, I Made Mangku Pastika selaku Gubernur Bali pada saat itu mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Bali, yang menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan pariwisata (Wiranata, et. al. 2020). Protes dari masyarakat serta berbagai elemen aktivis lingkungan terus berlanjut hingga saat ini, dan pada tahun 2020, aktivis lingkungan melakukan aksi unjuk rasa untuk memprotes proyek reklamasi Teluk Benoa (Rahmawati, 2020).

Penolakan masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa merupakan salah satu isu yang menarik pusat perhatian publik di Indonesia. Bila menggunakan kacamata teori gerakan sosial menurut Sidney Tarrow mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu pola dari tindakan kolektif yang memiliki tujuan untuk mencapai perubahan sosial yang signifikan dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, yang melibatkan penggunaan berbagai strategi seperti aksi langsung, kampanye politik, dan jaringan hubungan (Geraldine, et. al. 2021). Fenomena yang dinyatakan oleh Sidney Tarrow telah terealisasi dengan melihat bagaimana seluruh elemen dari masyarakat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa. Masyarakat Bali menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi yang ditimbulkan oleh reklamasi tersebut. Beberapa poin utama alasan dari penolakan masyarakat Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa antara lain adalah hilangnya mata pencaharian para nelayan, berkurangnya ruang publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan wilayah ekspansi lahan reklamasi tersebut sudah meliputi berbagai kawasan yang juga

disucikan (Handadari et. al. 2018). Lebih lanjut lagi mengapa masyarakat Bali menolak proyek reklamasi ini, salah satunya adalah karena dampak kerusakan lingkungan. Reklamasi Teluk Benoa akan merusak ekosistem laut dan hutan mangrove yang ada di kawasan tersebut yang akan berdampak negatif pada kehidupan para nelayan yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam di sekitar Teluk Benoa. Selain itu, reklamasi juga akan mengurangi daerah penyangga alami yang dapat menyerap gelombang pasang serta banjir (Handadari et. al. 2018).

Selain itu, masyarakat juga beranggapan bahwa proyek reklamasi ini adalah bentuk pembangunan yang tidak berkelanjutan. Bali sebagai destinasi pariwisata utama di Indonesia sudah sangat ramai dan mengalami masalah *over-tourism* (Nugraha, 2022.) per tahun 2017 Menurut data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan yang datang ke Bali pada tahun 2017 mencapai 4,8 juta orang, angka tersebut mampu mengalahkan angka penduduk provinsi Bali hingga tahun 2021 kemarin yang hanya mencapai 4,3 juta orang (Nugraha, 2022.). Hal ini telah menyebabkan beberapa masalah di Bali, seperti kemacetan lalu lintas, kekurangan air, dan kerusakan lingkungan.. Kebanyakan dari wisatawan yang datang ke Bali sebenarnya ingin menikmati keindahan alamnya, bukan hanya tempat wisata buatan dengan segala pencemaran lingkungannya yang serba mewah (Nugraha, 2022).

Dengan membangun proyek reklamasi ini, Bali dianggap akan kehilangan keaslian identitasnya sebagai penyandang salah satu destinasi wisata alamnya yang indah. Penolakan masyarakat Bali terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa telah dilakukan dalam berbagai cara dan berbagai upaya. Dan beberapa masyarakat Bali telah melakukan demonstrasi dan aksi protes terhadap proyek ini. Selain itu, sejumlah organisasi lingkungan dan masyarakat sipil juga telah terlibat dalam upaya untuk menghentikan proyek ini melalui berbagai jalur hukum.

Salah satu penggerak penggabungan berbagai elemen masyarakat yang menolak terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa ini adalah ForBali. Namun pada tahun 2017 melalui produksi aspirasi yang dituang melalui teks sempit terhambat, terdapat beberapa baliho yang diturunkan paksa oleh aparat berwajib di sepanjang jalan-jalan di sekitaran Denpasar, Badung, dan beberapa wilayah di Bali (ForBALI, 2017).

ForBali atau Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi merupakan sebuah organisasi Non-Governmental Organization atau NGO yang didirikan pada tahun 2013 dengan misi mempromosikan pariwisata di Bali secara berkelanjutan. Organisasi ForBali ini juga berfokus pada tiga bidang utama yang juga menjadi misi mereka seperti bidang pendidikan, pengembangan ekonomi, dan lingkungan hidup. ForBali juga telah berhasil mencapai berbagai pencapaian dalam mempromosikan keberlanjutan pariwisata di Bali (ForBali, 2013).

Pencapaian di antaranya seperti Pendidikan, ForBali telah berhasil membantu dalam pengembangan program pendidikan yang mempromosikan keberlanjutan pariwisata di Bali. Contohnya, ForBali telah membangun relasi dan bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk mengembangkan program pengajaran yang lebih berfokus pada lingkungan hidup dan keberlanjutan pelestariannya. Selanjutnya dalam bidang pengembangan ekonomi, ForBali telah membantu mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan secara signifikan di Bali dengan membantu mempromosikan produk-produk lokal dan memperkenalkan wisatawan pada kebudayaan Bali. Misalnya, ForBali telah membantu beberapa kelompok tani serta pengrajin di Bali guna meningkatkan pemasaran produk mereka. Dan juga dalam bidang lingkungan hidup. ForBali telah aktif dalam upaya melestarikan lingkungan hidup di Bali. Contohnya, ForBali telah membantu mengembangkan program pengelolaan sampah yang lebih efektif di beberapa kawasan wisata di Bali (ForBali, 2013).

ForBali yang begitu aktif dalam bidang lingkungan hidup tentu ikut andil dalam proses penolakan proyek reklamasi Teluk Benoa. ForBali terlibat dalam berbagai kampanye dan aksi protes guna memperjuangkan penolakan reklamasi Teluk Benoa. Organisasi ini bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat seperti kelian desa adat dan aktivis lingkungan untuk membangun opini publik serta memperjuangkan hak-hak masyarakat Bali dalam melindungi lingkungan dan keberagaman hayati yang ada di Teluk Benoa. Salah satu aksi protes yang dilakukan oleh ForBali adalah demonstrasi yang digelar pada bulan Agustus tahun 2015. Dalam aksi protes tersebut, ForBali mengumpulkan lebih dari 10.000 orang dari berbagai elemen tersebut untuk berpartisipasi dalam aksi protes di sekitar Teluk Benoa. Aksi protes ini bertujuan untuk menunjukkan dukungan publik yang kuat terhadap penolakan reklamasi Teluk Benoa dan memperlihatkan betapa pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan pariwisata di Bali (Surat Kabar ForBALI, 2014).

Organisasi ForBali juga ikut andil dalam proses hukum untuk berjuang dalam penolakan reklamasi Teluk Benoa. Organisasi ini turut membantu dalam pengumpulan laporan-laporan ilmiah serta bukti-bukti yang menunjukkan dampak negatif dari reklamasi tersebut bagi lingkungan hidup dan keberlangsungan sektor pariwisata di Bali. Dalam kampanyenya, ForBali juga berusaha untuk memberikan informasi yang tepat dan juga akurat mengenai reklamasi Teluk Benoa kepada masyarakat Bali dan dunia internasional. Organisasi ini juga memanfaatkan media sosial dan situs webnya untuk memberikan informasi kepada publik luas mengenai dampak negatif reklamasi serta betapa pentingnya menjaga lingkungan dan keberagaman hayati di Teluk Benoa (Surat Kabar Forbali, 2014).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana proses ForBali dalam mengadvokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses ForBali dalam mengadvokasi dan mensukseskan penolakan reklamasi Teluk Benoa

#### **1.4 Cakupan Penelitian**

Cakupan dalam penelitian ini berfokus pada upaya serta proses apa saja yang dilakukan oleh ForBali sebagai gerakan yang menjadi inisiator dalam mengadvokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa yang cukup membahayakan stabilitas lingkungan dan kehidupan masyarakat di Bali. ForBali dalam menuntaskan segala upayanya dengan menarik dukungan dari seluruh elemen masyarakat Bali yang mencakup bendesa adat dan seluruh jajarannya agar proses penolakan menjadi solid dan kuat karena berangkat dari seluruh masyarakat langsung. Kemudian ForBali sangat terbuka dengan pihak manapun baik itu individu dan kelompok yang berasal dari lembaga formal dan juga non formal untuk ikut andil satu suara dengan ForBali dalam penolakan reklamasi Teluk Benoa. Kemudian penelitian ini mengambil jangka waktu mulai dari tahun 2014 hingga 2020 karena pada tahun 2014 Presiden menerbitkan surat putusan untuk membolehkan Teluk Benoa dimanfaatkan menjadi lahan yang lebih produktif atau direklamasi.

Sembari berjalan dengan proses perubahan lahan menjadi kawasan pariwisata yang telah ditentukan pembangunannya oleh PT. Tirta Wahana Bali International di Teluk Benoa, ForBali dengan seluruh jaringan yang tergabung di dalamnya berbondong-bondong untuk berjuang menolak reklamasi di Teluk Benoa selama enam tahun terhitung hingga pada tahun 2020. Cakupan penelitian ini hanya dibatasi hingga tahun 2020 karena terakhir ForBali menolak tertanggal 26 Januari 2020 dengan landasan aksinya dilakukan karena masih khawatir dengan belum dicabutnya PERPRES no. 51 yang diterbitkan pada tahun 2014

tentang penetapan bahwa kawasan Teluk Benoa tentang pemanfaatan lahan untuk dijadikan wilayah yang lebih produktif. Seperti pada tahun 2014 ForBali melakukan demo turun langsung ke jalan dengan berorasi dan melakukan berbagai aksi, kemudian ForBali berhasil menggandeng seluruh masyarakat Bali dan berbagai individu serta kelompok baik berasal dari lembaga formal dan juga non formal dalam melakukan aksinya. Aksi tersebut didokumentasikan dan dipublikasikan melalui kanal Youtube milik ForBali sendiri (ForBali, 2014).

Kemudian aksi selanjutnya adalah pemasangan papan spanduk dan pamphlet penolakan reklamasi Teluk Benoa di tiap sudut wilayah Bali dimulai pada tahun 2014 sebagai aksi non-verbal penolakan reklamasi Teluk Benoa. Selanjutnya pada tahun 2015 terdapat event mini konser yang bertema “*Nawa Sanga*” yang memiliki makna penolakan dari Sembilan penjuru mata angin. Event ini diadakan ForBali sebagai ajang orasi dan menambah kesadaran masyarakat akan bahayanya proses reklamasi tersebut bagi tanah Bali (ForBali, 2015). Lalu pada tahun-tahun selanjutnya beragam aksi dilakukan oleh ForBali demi menghentikan proses reklamasi tersebut hingga pada tahun terealisasinya penghentian proses reklamasi yang jatuh pada bulan Agustus tahun 2018 lalu (Tribun Bali, 2018). Kemudian pada tahun 2019 (Kompas, 2019) dan 2020 ForBali masih menginisiasikan bahwa kemenangan di tahun 2018 tidak sepenuhnya dapat dinyatakan secara keseluruhan Teluk Benoa bebas dari ancaman dapat di reklamasi. Karena menurut ForBali ini bersandar pada PERPRES no.51 tahun 2014 belum dicabut yang dimana peraturan tersebut dinilai masih membelenggu Teluk Benoa yang akan diberlakukan ubah tata letak sesuai dengan peraturan presiden tersebut (Kompas, 2020). Selanjutnya untuk melihat bagaimana proses penolakan ini berlangsung, penulis menggunakan teori *Social Movements* untuk melihat bagaimana ForBali menjalankan instrument di dalam teori gerakan sosial.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Agar lebih memahami dan mengetahui masalah yang dibahas pada penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka atau mereview kembali pustaka yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis berfokus kepada upaya advokasi yang dilakukan NGO dalam penolakan reklamasi.

Penelitian pertama yang dapat ditinjau adalah buku yang berjudul “*Transnasionalisme: Peran dan Aktor non-Negara dalam Hubungan Internasional*” yang ditulis oleh Ani Soetjipto, Arivia Tri Dara Yuliestiana, Desak Putu Sinta Suryani, Dias Khadijah Kinanthi, Cazadira Fediva Tamzil, Puti Parameswari, Rachmayani, dan Amira Waworuntu pada tahun 2018. Penelitian tersebut menggunakan teori Transnasionalisme dengan pendekatan *Transnational Advocacy Network* milik Keck dan Sikkink untuk menjelaskan strategi advokasi yang dilakukan ForBali dalam menjaring seluruh elemen masyarakat dikancah global untuk memperluas gerakan tolak reklamasi di Bali dengan fasilitas saling bertukar informasi yang menjadi harapan untuk dapat mempengaruhi kebijakan. Hasil penelitian ini menyebutkan dalam proses panjang penolakannya ForBali mampu mendapatkan suara dari masyarakat dari berbagai negara, dan hal ini dapat menjadi suatu gebrakan untuk dapat mengubah kebijakan karena mendapat perolehan dari banyak suara yang suara tersebut tidak hanya berasal dari regional saja namun juga secara global (Ani Soetjipto, et.al, 2018).

Penelitian kedua yang dapat ditinjau melalui Jurnal Penelitian yang berjudul “*Efektivitas Sosial Media Dalam Gerakan Sosial Penolakan Reklamasi Teluk Jakarta, Indonesia*” yang ditulis oleh Khairil Anam, Lala M Kolopaking dan Rilus A Kinseng pada tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan paradigma penelitian konstruktivisme dengan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini berfokus dan memiliki tujuan untuk melihat efektivitas gerakan penolakan reklamasi di era digital. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosial media berperan sangat aktif dan juga efektif dalam mendorong

kepekaan sikap dan perhatian publik dalam gerakan, hal ini dapat dibuktikan dengan perluasan pesan penolakan reklamasi terjadi di berbagai daerah dan dapat mendorong untuk terciptanya perubahan kebijakan (Khairil Anam, et.al 2020).

Selanjutnya pada penelitian ketiga dapat ditinjau melalui buku yang berjudul "*Strategi Komunikasi Pemerintah Provinsi Bali Dalam Kasus Penolakan Reklamasi Teluk Benoa.*" yang ditulis oleh Nur Sofyan dan Suciati pada tahun 2018. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif serta menggunakan teori Komunikasi untuk menganalisis strategi komunikasi pemerintah provinsi Bali terhadap kasus penolakan reklamasi Teluk Benoa. Hasil dari penelitian tersebut tersaji data bahwa efektivitas strategi komunikasi terhambat karena pemerintah provinsi Bali sebagai perantara dan bukan sebagai pengambil keputusan. Namun beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali sudah cukup baik di antaranya terdapat membuka saluran komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, memfungsikan opinion leader, berinteraksi dengan kearifan lokal, dan melakukan studi kelayakan amdal dengan dunia akademisi. Dapat dilihat bahwa strategi komunikasi secara regional sudah berjalan dengan baik (Sofyan dan Suciati, 2018).

Selanjutnya penelitian terakhir dapat ditinjau melalui Jurnal yang berjudul "*Resistensi Masyarakat Lokal Terhadap Kapitalisme Global: Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa Bali Tahun 2012 - 2013.*" yang ditulis oleh Wayan Suantika pada tahun 2015. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menarik kesimpulan bahwa alasan seluruh elemen masyarakat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa karena dinilai berbenturan dengan adat, budaya, dan agama sebagai pemicunya. Kemudian hasil berikutnya adalah adanya ketidakaslian prosedural dan politik dalam penerbitan izin reklamasi Teluk Benoa dan adanya kemungkinan ancaman terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat lokal Bali (Suantika, 2015).

Secara garis besar, penelitian sebelumnya berfokus kepada advokasi ForBali untuk mendapatkan suara penolakan reklamasi Teluk Benoa secara global dengan pendekatan TAN, kemudian Efektivitas sosial media, Strategi komunikasi pemerintah Bali dan Resistensi masyarakat. Berangkat dari berbagai literatur yang telah ada, penulis berupaya untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang berbeda, penulis ingin membahas mengenai advokasi yang dilakukan ForBali selaku NGO dalam upaya penolakan reklamasi Teluk Benoa.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Terdapat banyak fenomena reklamasi di Indonesia dan tidak sedikit yang menuai banyak kontra terhadap fenomena tersebut mulai dari penolakan masyarakat akibat dari dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh reklamasi tersebut. Banyak peneliti mengaitkan fenomena penolakan tersebut ke dalam teori Gerakan sosial. Adapun dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teori Social Movement oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani, menurut Donatella Della Porta dan Mario Diani yang dikutip dari buku yang berjudul "*Social Movements An Introduction.*" (2006) Social Movement atau Gerakan Sosial adalah individu-individu yang tergabung ke dalam kelompok yang memiliki upaya atau kegiatan dengan tujuan untuk mencapai perubahan sosial atau politik dalam masyarakat. Gerakan sosial ini umumnya berkumpul untuk mengadvokasi atau melawan isu-isu tertentu yang mereka anggap penting atau masalah yang mereka ingin perbaiki baik itu ranahnya dalam politik, sosial, lingkungan, ekonomi dan juga budaya (Donatella dan Mario, 2006).

Selanjutnya, keberhasilan gerakan dapat diukur dalam berbagai cara, termasuk perubahan dalam kebijakan pemerintah, perubahan opini publik, atau perubahan dalam praktik sosial, karena sejatinya terbentuknya gerakan sosial juga merupakan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, keadilan, dan hak

asasi manusia. Perlu diketahui bahwa gerakan sosial, partai politik, dan kelompok kepentingan lainnya sering disamakan satu sama lain, dengan mengasumsikan bahwa mereka semua mencerminkan berbagai gaya organisasi politik. Perbedaan antara gerakan sosial dan organisasi lainnya ini bukan terletak pada perbedaan dalam karakteristik organisasi atau pola perilaku, melainkan pada kenyataan bahwa gerakan sosial terbentuk karena situasi dan keadaan yang mengakibatkan para individu menjadi sebuah jaringan yang memiliki satu suara untuk mengubah hal-hal yang mereka anggap patut untuk diubah (Donatella dan Mario, 2006).

Dalam Gerakan sosial, mereka akan melakukan advokasi dan melakukan berbagai aksi lainnya untuk menarik massa atau jaringan dengan tujuan mempengaruhi kebijakan serta tindakan pemerintah, masyarakat umum atau pihak swasta, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Donatella dan Mario, 2006). Selain itu, Donatella Della Porta dan Mario Diani juga mengatakan Gerakan sosial yang fokus ranah atau bidangnya dalam lingkungan terutama biasanya memiliki tujuan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan perlindungan alam. Mereka seringkali berjuang untuk mengatasi isu-isu seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, pelestarian satwa liar, dan isu-isu serupa (Donatella dan Mario, 2006).

Menurut Donatella Della Porta dan Mario Diani terdapat tiga konsep dalam teori Gerakan sosial, ini juga termasuk kedalam berbagai aksi serta upaya yang dilakukan Gerakan Sosial untuk mencapai tujuan yang diinginkan., di antaranya:

1. (*Conflictual Collective Action*). *Conflictual Collective Action* merupakan aksi dari gerakan sosial untuk mengintervensi tindakan serta kebijakan dari pelaku atau oposisi guna merubah tindakan atau kebijakan pelaku yang dianggap bertentangan dengan cara memperlihatkan sisi negatif dari perbuatan tersebut. Contoh aksi yang dapat dilihat berupa

aksi protes seperti demonstrasi massa atau unjuk rasa, tuntutan hukum, dan juga kampanye-kampanye perlawanan terhadap kebijakan tersebut (Donatella dan Mario, 2006, hal 21).

2. (*Dense Informal Networks*) Dense Informal Network merupakan sebuah pola dalam keorganisasian yang lebih fleksibel. Yang dimaksudkan dalam dense informal networks menurut Donatella Della Porta, tiap-tiap individu dalam keorganisasian tersebut dapat aktif berkontribusi untuk bertukar atau berbagi informasi dan juga sumber daya serta tidak memandang latar belakang dan siapa individu tersebut dalam keorganisasian, dengan tujuan tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Contoh aksi yang dapat dilihat berupa mediasi, kolaborasi dan juga negosiasi melalui kanal digital dan pertemuan secara langsung dengan seluruh elemen masyarakat (Donatella dan Mario, 2006, hal 21).

3. (*Collective Identity*) Collective Identity adalah hubungan dalam jaringan organisasi antar anggota di dalamnya. Keterikatan yang dimaksud meliputi solidaritas yang sangat kuat tanpa adanya unsur membeda-bedakan antar golongan atau individu. Solidaritas tersebut juga dapat tertuang dalam simbol-simbol dan juga seragam yang menjadi pondasi identitas kesatuan mereka. Kemudian kesadaran akan komitmen dan tujuan antar anggota dalam organisasi, saling kenal dan mengetahui latar belakang tiap-tiap anggota dapat menjadi pondasi yang kuat dalam organisasi dan menjadi pondasi awal untuk tergeraknya organisasi melalui koordinasi, dan juga mobilisasi antar anggota dalam organisasi (Donatella dan Mario, 2006, hal 21-22).

Selanjutnya bila menilik dari kutipan dari Donatella Della Porta dan Mario Diani di atas, teori gerakan sosial digunakan untuk mencegah masalah dan penanggulangannya secara menyeluruh di dalam lingkup kehidupan sosial. Poin-poin dari kutipan di atas juga dilakukan oleh ForBali guna melancarkan aksi penolakannya terhadap proses reklamasi Teluk Benoa. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terkait upaya sepanjang perjuangan penolakan reklamasi Teluk Benoa yang diadvokasi oleh ForBali sebagai NGO yang peduli terhadap lingkungan serta kehidupan sosial di Bali.

## **1.7 Argumen Sementara**

Dapat diketahui sementara bahwa isu utama yang selalu dipegang oleh organisasi ForBali dalam mengupayakan segala penolakan terhadap tindakan reklamasi Teluk Benoa melalui proses advokasi yang berangkat dari masyarakat Bali terlebih dahulu, mengajak masyarakat Bali dari seluruh elemen untuk bersatu dalam menyatakan pandangan mereka bahwa tindakan reklamasi Teluk Benoa ini cukup mengancam stabilitas sosial baik itu lingkungan maupun adat istiadat di Bali. Proses advokasi yang dilakukan oleh ForBali ini melalui berbagai upaya dan cara baik itu terjun langsung ke lapangan dengan menyuarakan berbagai aspirasi terkait segala keresahan yang ditimbulkan dari dampak reklamasi tersebut, ForBali juga menyuarakan berbagai aspirasinya melalui sosial media milik ForBali sendiri agar menjaring dukungan dari masyarakat lebih luas lagi. Kemudian fenomena ini dapat disandarkan pada teori gerkan sosial milik Donatella Della Porta dan Mario Diani yang memiliki tiga unsur dalam proses advokasi yang dilakukan ForBali, yakni *Conflctual Collective Action* sebagai instrumen yang menjadi upaya untuk menolak reklamasi Teluk Benoa seperti kampanye, demonstrasi dan jajak pendapat. Kemudian terdapat *Dense Informal Networks* yang mampu menggerakkan masyarakat dari seluruh elemen untuk bersatu melalui mediasi, negosiasi dan kolaborasi kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang terhadap proses reklamasi ini. Lalu yang terakhir *Collective Identity* yang memiliki aksi untuk tidak membeda-bedakan setiap golongan elemen masyarakat yang memiliki satu suara yang sama dengan ForBali, setiap elemen memiliki akses yang dapat melihat seluruh unsur yang menjadi penyebab penolakan reklamasi tersebut terjadi serta berpatokan pada komitmen dan tujuan yang telah disepakati bersama.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang biasanya dikenal dengan istilah penelitian dan pada dasarnya tidak menggunakan data berupa angka serta variabel. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode pengumpulan data-data menjadi satu berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi dengan mengamati fenomena yang menjadi masalah sosial disekitar kita (Wahidmurni, 2017). Penulis mengaplikasikan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif pengambilan data melalui buku-buku, jurnal-jurnal dan juga berita-berita yang memiliki kredibilitas tinggi serta media-media yang ForBali gunakan untuk bersuara dan mengkampanyekan penolakan reklamasi Teluk Benoa.

#### 1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi atau ForBali. Kemudian untuk Objek dalam penelitian ini adalah proses advokasi yang dilakukan oleh ForBali dalam penolakan reklamasi Teluk Benoa.

#### 1.8.3 Metode Pengumpulan Data.

Dalam membentuk sebuah penelitian diperlukan pengumpulan data-data untuk kemudian disatukan menjadi sebuah karya penelitian. Dalam upaya pengumpulan data, Penulis menggunakan metode pengumpulan data primer, data-data tersebut bersumber pada terjun secara langsung ke lapangan atau menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang kredibel. Kemudian data sekunder, data-data tersebut bersumber dari artikel-artikel, buku, jurnal, dan berita-berita langsung dari web ForBali dan dari media yang kredibel lainnya.

#### 1.8.4 Proses Penelitian

##### 1. Mencari Sumber Data

Pada tahap ini, penulis mencari data-data atau informasi yang memiliki keterkaitan secara langsung dan sejalan dengan tema penelitian terkait advokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh ForBali. Sumber data atau informasi ini diambil dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel, web media resmi ForBali, serta laman berita online yang kredibel.

## 2. Mengumpulkan dan Menganalisis Data

Setelah menemukan berbagai sumber data atau informasi yang sejalan dengan tema penelitian, kemudian penulis mengakumulasikan data-data tersebut menjadi satu. Dan selanjutnya, penulis menganalisis data yang telah tersajikan, hal ini dilakukan agar penulis dapat menjadikan data-data yang telah tersaji sebagai pembanding dan penulis akan memahami lebih lanjut isu yang sedang dibahas.

## 3. Menulis Literatur

Setelah memenuhi proses pengumpulan data dan data-data yang telah tersaji sudah dianalisis, penulis kemudian menuang hasil analisis data tersebut di dalam penelitian. Dalam proses penulisan penelitian, penulis akan mengacu kepada sumber-sumber data yang telah disajikan dan selanjutnya dielaborasi menjadi sebuah pembahasan.

### **1.9 Sistematika Pembahasan**

Dalam memudahkan untuk mengikuti seluruh bagian pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

## **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama, penulis memaparkan tentang latar belakang masalah dari ForBali yang mengadvokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa, rumusan masalah tentang bagaimana ForBali mengadvokasi penolakan tersebut, tujuan penelitian guna mengetahui bagaimana

ForBali dalam mengadvokasi penolakan tersebut, cakupan penelitian, tinjauan pustaka sebagai pembanding penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang menjadi sandaran teori terhadap fenomena penolakan dari ForBali terhadap reklamasi Teluk Benoa, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai struktural isi dari penelitian.

## **BAB 2 : FORBALI DAN ADVOKASI PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA**

Pada bab kedua, penulis menjelaskan lebih lanjut apa itu Teluk Benoa, Pemerintah dan PT.TWBI, profile ForBali terdiri dari elemen mana saja, serta pro dan kontra terhadap penolakan reklamasi Teluk Benoa dari ForBali hingga pihak terkait seperti pemerintah.

## **BAB 3 : PROSES FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI (ForBALI) DALAM MENGADVOKASI PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA PADA TAHUN 2014-2020**

Pada bab ketiga, penulis memaparkan analisis peran ForBali dalam mengadvokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa dengan teori Social Movements yang dikemukakan oleh Donatella Della Porta dan Mario Diani.

## **BAB 4 : PENUTUP**

Pada bab terakhir, penulis menyuguhkan kesimpulan dari penelitian serta pembahasan yang sudah disusun oleh penulis.

## BAB 2

### FORBALI DAN ADVOKASI PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA

#### 2.1. Teluk Benoa

Teluk Benoa adalah teluk alami yang terletak di wilayah bagian selatan Pulau Bali dengan luas 1.243 hektar. Teluk Benoa dikelilingi oleh daratan dan merupakan pelabuhan alami yang dilindungi oleh pulau-pulau kecil di sekitarnya. Teluk Benoa sangat berperan penting terhadap kehidupan masyarakat di Bali terutama dalam unsur adat-istiadat, ekonomi dan juga pariwisatanya karena wilayahnya juga tidak jauh dengan Kota Denpasar dan Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Teluk Benoa terdapat pada perairan lintas Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kabupaten Badung berada pada  $08^{\circ}14'20''$  –  $08^{\circ}50'48''$  lintang selatan dan  $115^{\circ}05'00''$  –  $115^{\circ}26'16''$  bujur timur serta memiliki kisaran luas 7,43% dari total keseluruhan luas Pulau Bali. Sedangkan wilayah Kota Denpasar sendiri berada di  $08^{\circ}35'31''$  –  $08^{\circ}44'49''$  lintang selatan dan  $115^{\circ}10'23''$  –  $115^{\circ}16'27''$  bujur timur dengan kisaran luas 2,18% dari total keseluruhan luas Pulau Bali (Bappeda Bali, 2017).

Secara khusus, Teluk Benoa termasuk bagian dari tiga kecamatan, yaitu Denpasar Selatan, Kuta, dan Kuta Selatan serta dikelilingi oleh 12 desa atau kelurahan yang masing-masing terdapat 6 desa atau kelurahan di Kota Denpasar dan 6 desa atau kelurahan sisanya di Kabupaten Badung (Bappeda Bali, 2017). Teluk Benoa ini cukup banyak memiliki hotel, resor, dan fasilitas pariwisata lainnya yang menjadi salah satu alasan mengapa perlu direlokasi dan ditingkatkan untuk menunjang dan melonjukkan sektor pariwisata. Selain itu, teluk ini juga menjadi basis untuk berbagai kegiatan wisata air, seperti olahraga air, menyelam, snorkling, dan berbagai jenis perahu wisata. Pesisir Teluk Benoa juga menjadi tempat bagi banyak restoran, toko sovenir, dan pusat kegiatan rekreasi laut. Selain itu, di sekitar Teluk

Benoa terdapat pulau-pulau kecil yang dapat diakses melalui perahu, seperti pulau Serangan, pulau Pudut dan pulau-pulau kecil lainnya. Selain sebagai destinasi pariwisata, Teluk Benoa juga memiliki pelabuhan yang berfungsi sebagai pelabuhan kargo dan pelabuhan penumpang. Pelabuhan ini penting untuk aktivitas perdagangan dan transportasi di Bali (Soetjipto, 2018).

Selain menjadi Kawasan pariwisata bagi Bali, Teluk Benoa juga merupakan Kawasan konservasi dan ekonomi lokal. Teluk Benoa menawarkan lingkungan laut yang kaya dan beragam. Di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati laut, termasuk spesies endemik yang mungkin tidak ditemui di tempat-tempat lainnya. Selain itu, hutan mangrove di sekitar teluk berperan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem pesisir dan menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Kemudian untuk perputaran ekonomi lokal, nelayan-nelayan lokal di sekitaran wilayah Teluk Benoa mencari nafkah di perairan teluk tersebut dengan menangkap ikan dan sumber daya laut lainnya. Keberlanjutan ekosistem laut dan mangrove sangat penting bagi kehidupan nelayan-nelayan lokal tersebut (Soetjipto, 2018). Lebih lanjut lagi, pulau Bali yang dikenal tidak hanya sebagai pulau berbasis pariwisata, namun pulau Bali juga dikenal sebagai pulau dengan identitas kesakralan dan sangat kental akan keagamaan dan kebudayaannya.

Kawasan Teluk Benoa ini juga terdapat kawasan keagamaan, disucikan atau menjadi bagian dari kebudayaan bagi masyarakat Hindu di Bali karena terdapat pulau-pulau yang di dalamnya memiliki Pura atau tempat persembahyangan dengan 60 titik kawasan suci (Mongabay, 2015), termasuk pulau-pulau yang di dalamnya memiliki Pura atau tempat persembahyangan bagi masyarakat Hindu Bali. Masyarakat Hindu Bali yang sangat mengedepankan konsep kehidupan *Tri Hita Karana* yang artinya tiga unsur utama yang membentuk kehidupan. Konsep ini memiliki perspektif hubungan yang harmonis antara Ketuhanan yang Maha Esa, Manusia, dan Alam Semesta. Dengan menyatukan aspek-aspek

ini, Teluk Benoa bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga wilayah yang memainkan peran penting dalam konservasi alam, pembangunan ekonomi lokal, dan menjaga warisan keagamaan. Kesadaran akan pentingnya harmoni antara konservasi lingkungan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan nilai-nilai keagamaan dapat membantu memastikan keberlanjutan Teluk Benoa untuk generasi mendatang. Maka dari itu ForBali terus melakukan perlawanan dan siap melakukan perlawanan dalam bentuk apapun secara damai untuk menghentikan kebijakan reklamasi Teluk Benoa tersebut. (Mongabay, 2015).

*“...apalagi di sana kan ada Kawasan sucinya ya, di dalam Teluk Benoa itu. Kita Yakini ada yang Namanya Pura Campuhan, di sana kita mengambil air untuk dijadikan Tirta, jika itu di reklamasi, maka air itu tidak akan bisa suci lagi, itu yang kita percayai, Fal. Seperti itu. ... ya tepat sekali, Fal. Tri Hita Karana dengan konsep hubungan antar Manusia, Alam dan Tuhan, dan itu sangat kita junjung dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Fal.”* (Wawancara Gede Mertadana pada 21 Februari 2024).

## **2.2. Pemerintah dan PT TWBI.**

Peran pemerintah dalam perancangan reklamasi Teluk Benoa yang menuai pro dan kontra tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 122, Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, serta Peraturan Presiden (Perpres) nomor 51, Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kawasan Teluk Benoa dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan ekonomi, pariwisata dan pemukiman. Sedangkan wilayah Teluk Benoa ini masuk ke dalam wilayah konservasi atau dilindungi karena memiliki ekosistem mangrove serta berbagai jenis spesies endemik yang mungkin tidak ditemui di tempat-tempat lainnya, dan ini tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 45, Tahun 2011 tentang rancangan perubahan tata letak wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (ForBALI, 2013).

Pada tahun 2012 investor properti PT TWBI (Tirta Wahana Bali Internasional) mencanangkan akan melakukan reklamasi pada Kawasan tersebut. Hal ini semakin dilancarkan dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Bali No 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan Pengembangan, dan Pengelolaan Teluk Benoa serta Peraturan Presiden pada Mei 2014 mengenai status Teluk Benoa yang diubah menjadi Kawasan pengembangan dan pemanfaatan (Budi Daya). Dengan kata lain Kawasan ini diperbolehkan untuk dilakukan reklamasi (Tajem, 2015).

Luas Kawasan Teluk Benoa +/- 1400 hektar. Wilayah yang akan dibangun yakni seluas 700 hektar yaitu 50% dari luas keseluruhan wilayahnya. Selain itu akan dibangun pusat-pusat wisata baru seluas 400 hektar dan 300 hektar lagi akan digunakan untuk ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan fasilitas sosial (Rena, 2015). Menurut PT. TWBI pembangunan ini akan mendukung peningkatan produktifitas Teluk Benoa, terutama sedang dilaksanakannya pembangunan Pelabuhan Benoa, Bandara Internasional Ngurah Rai dan juga Tol Bali-Mandara. Dalam penyelenggaraan reklamasi Teluk Benoa diperlukan pengambilan pasir sebanyak 30.000.000 m<sup>3</sup> di perairan Selat Alas, Kabupaten Lombok Timur, NTB oleh PT Dinamika Atria Raya (DAR) selama lima tahun (Tajem, 2015).

Rancangan pembangunan Teluk Benoa meliputi pengembangan Pulau Pudut, Pembangunan Fisherman's Cove, Pembangunan Botanical Garden serta fasilitas umum dan sosial lain seperti *Exhibiton centre*, Pusat Kebudayaan Bali, Rumah sakit bertaraf internasional, perumahan ramah lingkungan dan sekolah pariwisata. Pulau Pudut dalam rancangan reklamasi akan dikembangkan sebagai pulau adat dan budaya. Tahun 1999 luas Pulau Pudut mencapai 4,5 hektar, namun akibat abrasi yang terjadi mengakibatkan penyempitan wilayah hingga menjadi kurang dari 1 hektar (Rena, 2015). Pengembangan yang dilakukan PT. TWBI ingin mengembalikan luas Pulau Pudut seperti semula, yakni menjadi +/- 8 hektar. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan dan memprioritaskan budaya dan

adat setempat dengan mengedepankan prinsip Tri Hita Karana untuk menciptakan hubungan harmonis antara alam, Tuhan dan manusia (Rena, 2015).

**Gambar2. 1** Rencana Pengembangan Pulau Pudut



Sumber: Rena (2015) diambil dari website <http://twbi.co.id>

Rancangan lain adalah pendirian Kawasan Fisherman's Cove yang dilandaskan atas kepedulian PT. TWBI untuk memberdayakan dan mengembangkan para Nelayan dalam menjaga sumber mata pencaharian Nelayan Lokal Teluk Benoa. Kekayaan laut seperti udang, kepiting dan ikan hasil tangkapan nelayan, akan dipasok ke hotel, restoran dan Kawasan residen sebagai proses jual beli. Hal ini juga dapat meningkatkan dan menyeimbangkan perputaran ekonomi di Kawasan Teluk Benoa, khususnya bagi Nelayan Lokal.

**Gambar2. 2** Gambar 2. 1 Rencana Pengembangan Fisherman's Cove

Sumber: Rena (2015) diambil dari website <http://twbi.co.id>



Gambar2. 3 Lambang Identitas Forbali



Sumber: ForBali diambil dari <https://www.forbali.org>

### **2.2.1. Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI).**

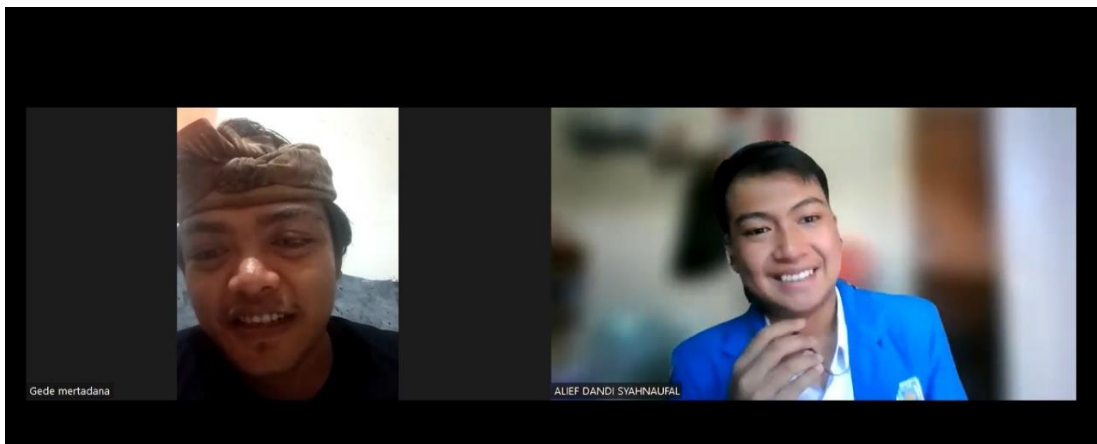
ForBali atau Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa merupakan organisasi yang bergerak dibidang lingkungan dan kemanusiaan. Dari fokus dalam bidang tersebut tentu isu konstruksi reklamasi ini perlu mereka tolak dengan alasan pencemaran lingkungan serta mengganggu stabilitas kehidupan di pulau Bali. Konflik antara ForBali dan Pemerintah disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mengindahkan PERPRES no 45 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi yang dilindungi dan pelarangan pengubahan atau pembangunan di wilayah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam peraturan presiden nomor 51 tahun 2014, hal ini juga yang menjadi sumber konflik antara ForBali dan juga Pemerintah karena PERPRES no 51 tahun 2014 bertentangan dengan konsep kehidupan *Tri Hita Karana*.

*...Yang kita lakukan adalah menolak undang-undang PERPRES no. 51 tahun 2014 pada saat itu yang menyatakan perubahan wilayah konservasi menjadi wilayah reklamasi, Fal. Karena menurut kita saat terjadinya reklamasi itu akan menyebabkan yang Namanya banjir, terumbu karang kita rusak, apalagi di sana kan ada Kawasan sucinya ya, di dalam Teluk Benoa itu. Kita Yakini ada yang Namanya Pura Campuhan, di sana kita mengambil air untuk dijadikan Tirta, jika itu di reklamasi, maka air itu tidak akan bisa suci lagi, itu yang kita percayai, Fal. Seperti itu. ... ya tepat sekali, Fal. Tri Hita Karana dengan konsep hubungan antar Manusia, Alam dan*

*Tuhan, dan itu sangat kita junjung dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Fal.*  
(Wawancara Gede Mertadana pada 21 Februari 2024).

Dalam proses penelitian ini penulis berhasil mewawancarai salah satu aktivis ForBali untuk mengumpulkan data penelitian. Proses wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Februari tahun 2024 bersama narasumber Gede Mertadana.

*Gambar2. 4 Sesi Wawancara dengan Gede Mertadana melalui daring via Zoom*



Penulis berhasil mewawancarai salah satu aktivis ForBali pada tanggal 21 Februari 2024

ForBali merupakan organisasi yang tergabung dari seluruh lapisan masyarakat. Tipe organisasi ini berbentuk lintas sektoral atau teraliansi dari berbagai lapisan elemen masyarakat seperti lembaga-lembaga, kelompok dan individu. Lembaga yang dimaksudkan terdiri dari masyarakat adat, pemuda adat atau *Sekaa Truna-Truni*, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, seniman, serta individu-individu yang peduli terhadap Bali dari sektor lingkungan, budaya dan sosial. Cara penyatuan berbagai lapisan masyarakat oleh ForBali ini selalu diadakannya berbagai pertemuan di balai-balai banjar di seluruh wilayah Denpasar, pertemuan tersebut dapat dihadiri masyarakat-masyarakat untuk mengetahui betapa problematiknya proyek reklamasi tersebut (ForBali, 2014).

*Gambar2. 5 Peninjauan Kembali dan Edukasi Bersama terkait Reklamasi di Salah Satu Desa Adat*



Sumber: ForBali. diambil dari <https://www.forbali.org>

*“...untuk mediasi dengan masyarakat itu kita memang selalu bersinergi dengan masyarakat melalui edukasi terkait dampak dari reklamasi itu sendiri, dan bagusnya itu masyarakat sangat terbuka terus menerima itu dengan baik dan tidak pernah ditolak oleh masyarakat terkait kegiatan yang kita lakukan itu. Positifnya adalah masyarakat yang awalnya awam dengan masalah yang sedang kita lawan ini menjadi paham dan begitu seterusnya hingga masa kita itu terus bertambah banyak. ...kita mengajak masyarakat itu melalui berbagai media fal. Seperti sosial media, melalui undangan-undangan untuk kegiatan edukasi atau pengenalan reklamasi ini di banjar-banjar, terus ada juga kita adakan melalui konser terbuka, nah itu kan kita undang masyarakat fal. Dampak setelahnya itu di demonstrasi berikutnya itu jumlah masanya lebih banyak lagi.” (Wawancara Gede Mertadana pada 21 Februari 2024).*

Selanjutnya ForBali mengadakan event-event mulai dari konser hingga pagelaran seni budaya seperti event *Nawa Sanga Art Festival* yang diikuti dari berbagai seniman terkenal di Bali seperti Superman Is Dead dan juga Nosstress. Dalam event ini ForBali menyisipkan pesan-pesan atau orasi yang menyuarakan dengan lantang penolakan reklamasi Teluk Benoa. Dari berbagai strategi dan upaya tersebut dampak yang mulai terasa adalah masyarakat semakin teredukasi dan sadar akan berbahayanya konstruksi reklamasi. Masyarakat yang terlibat pun semakin banyak untuk ikut menolak di antaranya para jajaran bendesa adat,

berbagai seniman terkenal seperti Glenn Fredly, Iwan Fals, Nosstress dan SID, organisasi LSM seperti WALHI, Greenpeace Indonesia, Denpasar Lawyers Club dan KONTRAS. ForBali yang tergabung dari berbagai lapisan masyarakat ini tadi juga memiliki jaringan individu yang juga bergabung ke dalam kabinet pemerintahan dan bermain peran sebagai pemerintah agar memiliki power yang sama seperti anggota legislative mulai dari DPRD tingkat kota, provinsi dan juga DPR RI. serta beberapa tokoh penting seperti Pasek Suardika selaku DPD Bali, I Wayan Suadi Putra dan Anak Agung Kompyang Raka sebagai anggota DPRD tingkat Kota. Kemudian upaya selanjutnya pada 13 Maret 2015 lalu ForBali memulai protes perdana dengan mengajukan banding. ForBali menerbitkan surat pernyataan sikap menolak kepada pemerintah terhadap rencana konstruksi reklamasi (ForBALI, 2015). Upaya selanjutnya ForBali melakukan mediasi kepada pemerintah namun mediasi tersebut hanya bisa sampai ke kantor DPR saja yang berlokasi di daerah Renon, Denpasar Timur. ForBali memang kerap ingin melakukan upaya-upaya untuk dapat duduk bermediasi dengan pemerintah pusat karena itu merupakan titik vital dan yang paling penting untuk dapat mencegah dilanjutnya proyek reklamasi namun ForBali tak pernah berhasil. Menilik dari hal tersebut, dengan upaya ForBali melakukan mediasi bersama DPR, ForBali berharap buah dari mediasi tersebut dapat tersampaikan oleh DPR kepada pemerintah pusat.

*“...Untuk seni kita selalu melakukannya karena kita pulau bali kan tidak bisa lepas dari adat istiadat dan budaya termasuk keseniannya. Nah kita selalu mengadakan seni music seni karawitan dan seni tari untuk menarik masyarakat dan selain itu dapat menjadi hiburan lah untuk masyarakat kita, nah sembari melakukan event atau konser kesenian kita sisipkan sebuah berita atau orasi-orasi untuk menolak reklamasi teluk benoa, jadi masyarakat juga melek dengan proyek ini betapa bahayanya bagi Bali. ...Untuk itu sangat ada fal kalau dari masyarakat lebih membuka diri dan sangat teredukasi untuk ikut yang namanya menolak reklamasi ini agar tidak terjadi. ... untuk kampanye-kampanye dari kita ada beberapa dari tokoh kita yang masuk menjadi anggota legislative di dprd tingkat kota, provinsi dan juga RI, beberapa dari mereka menyatakan menolak reklamasi teluk benoa dan sudah mengajukan banding ke pemerintahan pusat untuk mencabut lah izin ini dan itu astungkara sudah berjalan lancar dari dulu. ...untuk tokoh-tokoh pentingnya saja yang saya sebutkan ya. Di kampanye tersebut yang ikut andil ada DPR tingkat kota ada Wayan Suadi Putra yang*

*kebetulan berasal dari Sidakarya, kemudian Anak Agung Kompyang Raka. Nah untuk tokoh-tokoh yang berasal dari kubu senimannya sangat banyak fal. Ada band-band dan seniman lainnya yang cukup terkenal di Indonesia seperti SID atau Superman Is Dead, Iwan Fals, SOB atau Scared Of Bums, Marjinal dan Nosstress, dan masih banyak lagi Fal, kalau disebutkan semua satu-satu nanti kebanyakan \*tertawa\*.” (Wawancara Gede Mertadana pada 21 Februari 2024).*

Selanjutnya terdapat berbagai aksi demo yang dilakukan oleh ForBali yang cukup masif diadakan pada tahun 2014. Aksi ini diikuti oleh seluruh bendesa adat dan seluruh masyarakat yang tergabung dalam ForBali dan aksi ini dilakukan di daerah yang cukup dekat dengan Teluk Benoa. Berbagai aksi dilakukan sampai pada tanggal 28 Februari 2016 lalu ForBali mengepung daerah perairan dan daratan Teluk Benoa. Terdapat 4 titik aksi penolakan yakni di antaranya sisi Utara Jalan Tol Bali Mandara, sisi Selatan Jalan Tol Bali-Mandara, sisi Timur Jalan Tol Bali-Mandara (sisi ini merupakan perairan Teluk Benoa.), dan sisi Barat Jalan Tol Bali-Mandara. Aksi penolakan ini berisi berbagai keluhan dan orasi yang disuarakan oleh ForBali terkait problematikanya reklamasi Teluk Benoa baik itu dari faktor dan dampaknya terhadap lingkungan, adat dan budaya di Bali. Berbagai aksi yang dilakukan ForBali ini menunjukkan kesatuan serta kegigihan dari masyarakat dan juga ForBali dalam menolak reklamasi Teluk Benoa, karena mereka merasa bahwa reklamasi ini tentu akan merugikan lingkungan, mengancam keberlangsungan budaya dan adat, serta tidak memperhatikan kepentingan masyarakat lokal. (ForBali, 2016).

*“...untuk pemerintah sendiri kita hanya bisa sampai di DPR saja fal, pada saat itu demonstrasi dilakukan di Gedung DPR Bali, di Renon, nah itu pihak ForBali menduduki Gedung DPR dan mediasi pun dilakukan, akan tetapi kami tidak menemukan titik terangnya sama sekali pada waktu itu, tapi untuk sekarang sudah ada titik terangnya, fal. ...kira-kira itu tahun 2019, fal. Itu tahun-tahun yang sangat ramai penolakan bahkan ada di 2 titik hingga 3 titik sekaligus di Bali, seperti itu. Yang paling besar itu di Gedung DPR pada saat itu, seluruh masyarakat memasuki Gedung DPR secara paksa agar bisa bermediasi dengan DPR kita karena mereka itu wakil kita gitu lho. Mereka bisa mengapresiasi kita dengan baik namun tidak ada titik terang pada saat itu. (Wawancara Gede Mertadana pada 21 Februari 2024).*

### **2.2.2 Jaringan ForBALI dan Media Penyaluran Informasi.**

Selain bertatap muka secara langsung dengan masyarakat, ForBali memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan segala bentuk informasi terkait penolakan reklamasi Teluk Benoa kepada khalayak luas. Menurut Boyd dan Ellison, media sosial memiliki kapabilitas unik untuk membangun jaringan sosial yang luas dan beragam, yang memungkinkan pesan dan informasi menjangkau audiens yang lebih luas dengan cepat. Mereka menyatakan bahwa platform ini memungkinkan individu untuk terhubung melintasi batas geografis, sehingga memperluas jangkauan pesan yang disampaikan (Boyd dan Ellison, 2007). Media sosial memainkan peran penting dalam menjangkau audiens yang luas dan memungkinkan penerimaan pesan dengan cepat.

Keunggulan ini menjadikan media sosial sebagai alat yang sangat efektif dalam berbagai konteks, mulai dari pemasaran dan bisnis hingga gerakan sosial dan kampanye politik. Dengan memanfaatkan kekuatan media sosial, individu dan organisasi dapat menyampaikan pesan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Media sosial telah terbukti efektif dalam gerakan sosial dan kampanye politik, seperti yang terlihat dalam kasus penolakan reklamasi Teluk Benoa ini, ForBali dengan tepat pada sasarannya menargetkan audiens secara luas untuk menerima pesan-pesan dan membagi aktifitasnya pada khalayak umum dan masyarakat global. Pesan-pesan dan informasi terkait dapat disebar dengan cepat, menggalang dukungan massa dalam waktu singkat.

*“...kita mengajak masyarakat itu melalui berbagai media fal. Seperti sosial media, melalui undangan-undangan untuk kegiatan edukasi atau pengenalan reklamasi ini di banjar-banjar, terus ada juga kita adakan melalui konser terbuka, nah itu kan kita undang masyarakat fal. Dampak setelahnya itu di demonstrasi berikutnya itu jumlah masanya lebih banyak lagi. ... ya baik, untuk penggunaan media sosial dari ForBali itu ada di Instagram, facebook dan twitter, di sana kita memposting informasi tentang kegiatan demonstrasi kita, tentang dampak-dampak reklamasi itu sendiri. Pada intinya harapan kita melalui informasi yang sudah kita sebar di seluruh platform media sosial itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk lebih tahu bahwa penolakan*

*reklamasi itu harus selalu diperjuangkan demi pulau Bali yang kita cintai ini.”*  
(Wawancara Gede Mertadana pada 21 Februari 2024).

### **2.2.2.1 Twitter.**

ForBali memilih platform Twitter sebagai salah satu dari berbagai platform media sosial sebagai jembatan untuk menyebarkan berbagai kegiatan dan kampanye yang dilakukan oleh ForBali. Selain itu pada akun ini juga menyampaikan informasi terkini seputar reklamasi Teluk Benoa seperti penolakan terhadap keputusan yang dibuat oleh pemerintah, serta dampak reklamasi bagi kehidupan masyarakat dan juga lingkungan di Bali. Akun @ForBALI13 di platform twitter ini telah aktif sejak tahun 2013 lalu dan memiliki kurang lebih sebanyak 94.424 pengikut (Terakhir dilihat pada 30 Mei 2024). @ForBALI13 selalu menggunakan tagar #BaliTolakReklamasiTelukBenoa dan juga #BatalkanPerpresNo51Thn2014 untuk setiap postingan yang diunggah.

Gambar2. 6 Profile Twitter @ForBALI13



Sumber: <https://x.com/forbali13>

Gambar2. 7 Bentuk Postingan Twitter @ForBALI13



Sumber: <https://x.com/forbali13>

### 2.2.2.2 Instagram

ForBali juga memanfaatkan media sosial Instagram dalam menyampaikan informasi tentang penolakan reklamasi Teluk Benoa pada masyarakat Bali dan khalayak luas. Dalam akun @forbali13 yang mulai aktif sejak Juli 2014, berisikan unggahan terkait kampanye yang dilakukan seperti undangan berbentuk poster terkait waktu, tempat aksi dilakukan untuk aksi turun ke jalan. Selain itu terdapat unggahan lain seperti wawancara dan juga pembahasan terkait buruknya reklamasi Teluk Benoa bersama media-media dan juga

dokumentasi berupa video dan foto aksi demonstrasi serta pagelaran seni dan festival musik yang di dalamnya disisipi unsur penolakan reklamasi. Akun @forbali13 memiliki 125.000 pengikut dengan jumlah postingan 1.548 (Terhitung 30 Mei 2024). Tagar yang selalu digunakan untuk tiap postingan @forbali13 yakni #BaliTolakReklamasi, #tolakreklamasitelukbenoa, dan #batalkanperpres51th2014.

Gambar2. 8 Profil Instagram @forbali13



Sumber: <https://www.instagram.com/forbali13/>

Berikut adalah beberapa contoh postingan dalam akun Instagram ForBali:

Gambar2. 9 Undangan Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa.



Sumber: <https://www.instagram.com/forbali13/>

Gambar2. 10 Wawancara I Wayan “Gendo” Suardana selaku Koordinator Umum ForBali dengan Media Lokal Bali TV



Sumber: <https://www.instagram.com/forbali13/>

### 2.2.2.3 Facebook.

Selain Twitter dan Instagram ForBali juga aktif di Facebook sejak 24 Agustus 2013 lalu sebagai media untuk menyampaikan informasi terkait penolakan reklamasi Teluk Benoa. Menurut penulis, alasan ForBali juga menggunakan Facebook sebagai media untuk menhyebarkan informasi adalah untuk menjangring lebih banyak lagi audiens untuk ikut andil bersama menolak proyek ini. Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 Facebook merupakan media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia oleh berbagai kalangan. Facebook merupakan sosial pertama dengan pengguna Facebook mencapai angka kurang lebih 1 Milyar pengguna pada tahun 2013 (Ivariana, 2013). Jadi semakin banyak ruang media untuk bergerak, semakin banyak pula audiens mampu untuk didapatkan. Akun milik ForBali yang bernama “Bali Tolak Reklamasi” ini memiliki 119.000 pengikut dan 120.000 likes (Terhitung 30 Mei 2024). Tagar yang kerap digunakan dalam tiap postingan akun Facebook “Bali Tolak Reklamasi” adalah #TolakReklamasiBerkedokRevitalisasiTelukBenoa,

#TerbitkanPerpresKonservasiTelukBenoa, #TolakReklamasiTelukBenoa dan #BatalkanPerpresNo51Thn2014.

Gambar2. 11 Profile Facebook ForBali



Sumber: <https://www.facebook.com/forbali13>

Gambar2. 12 Bentuk Unggahan di Facebook ForBali

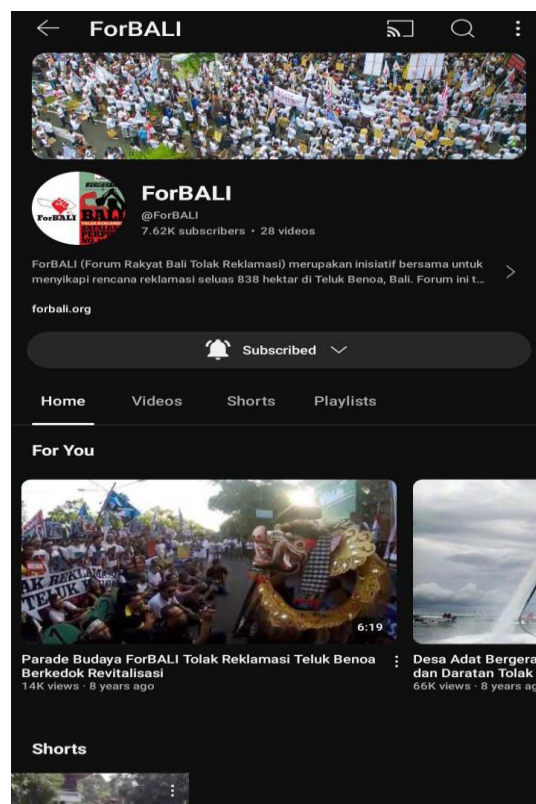


Sumber: <https://www.facebook.com/forbali13>

### 2.2.2.3 YouTube.

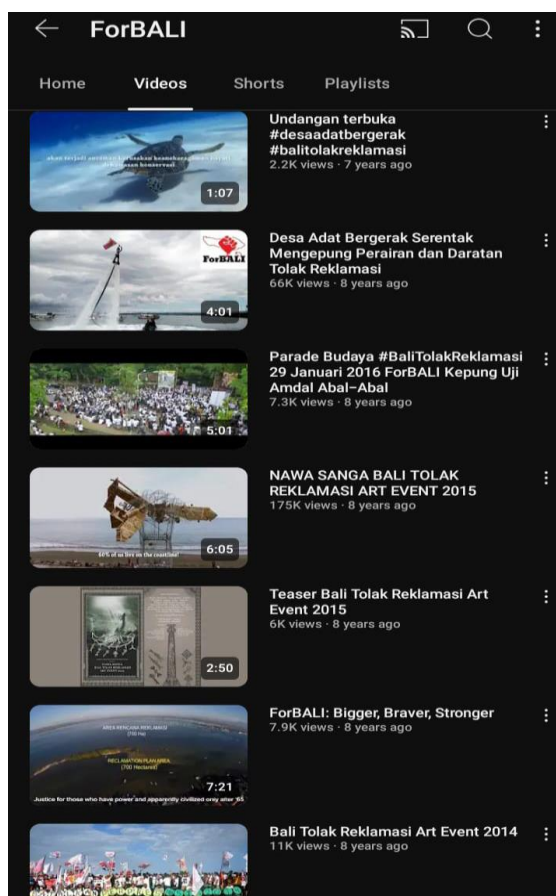
ForBali juga menggunakan YouTube sebagai media penyebaran informasinya. Akun Youtube dengan nama 'ForBali' ini berisi berbagai video dokumentasi kampanye. Video yang diunggah berupa edukasi mengenai dampak negatif dari pelaksanaan reklamasi dan pagelaran seni hingga konser yang diadakan. Selain itu ForBali juga mengunggah beragam dokumentasi pernyataan menolak reklamasi Teluk Benoa dari tokoh-tokoh terkenal mulai dari Glenn Fredly, Iwan Fals, Ras Muhammad, hingga kancah internasional seperti Donisha Prendergast dan juga Masia One selaku cucu dari seniman music *Reggae*, Bob Marley. Akun YouTube @ForBALI yang sudah aktif tertanggal 21 Agustus 2013. *Subscribersnya* telah mencapai 7062 dan total postingan secara keseluruhan dilihat sebanyak 1,707,016 views.

*Gambar2. 13 Profile YouTube ForBALI*



Sumber: <https://youtube.com/@forbali>

Gambar2. 14 Isi Konten dalam Akun YouTube ForBALI



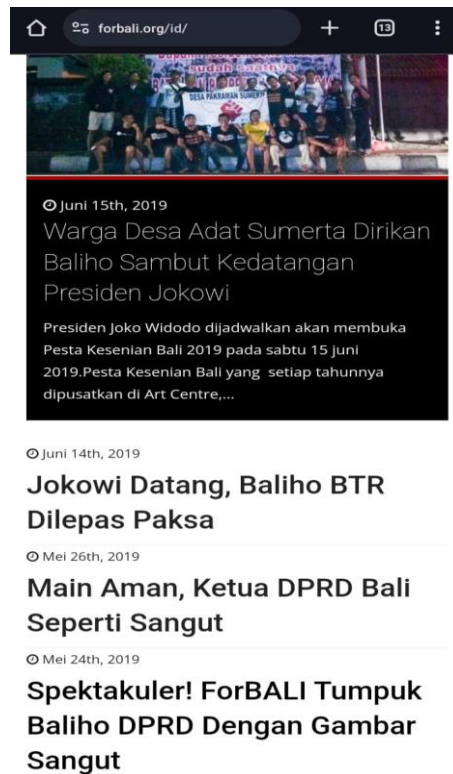
Sumber: <https://youtube.com/@forbali>

#### 2.2.2.4 Website Resmi ForBali ([forbali.org.id](http://forbali.org.id))

ForBali juga memiliki website resmi dan aktif sejak 2013 dengan laman web <https://forbali.org.id>. Website tersebut digunakan untuk memuat berbagai macam informasi penting seputar reklamasi Teluk Benoa dan penolakannya yang lebih mendetail, akurat, *up to date* dan mendalam. Berbagai aktifitas dan upaya mulai dari informasi yang memuat bagaimana awal mula dan alasan mereka menolak, bagaimana interaksi ForBali dengan pemerintah, desakan-desakan beserta berbagai dokumen resmi dari ForBali untuk pemerintah, dokumen pengantar perencanaan reklamasi Teluk Benoa yang diterbitkan oleh pemerintah pun juga tersedia dalam bentuk unggahan artikel di website tersebut. Tidak hanya itu, seluruh elemen masyarakat mulai dari masyarakat desa dan bendesa adat, musisi, komunitas internal,

eksternal, regional dan internasional, individu-individu yang cukup berpengaruh dikalangan professional, berbagai lembaga swadaya masyarakat, civitas akademika, serta individu-individu yang peduli dengan pulau Bali yang menolak juga didokumentasikan dan diunggah di website tersebut.

**Gambar2. 15 Beranda Website ForBali**



Sumber: ForBali diambil dari <https://www.forbali.org>

**Gambar2. 16 Surat Terbuka untuk Pemerintah Terkait Penolakan dari ForBali**

☉ Maret 24th, 2015  
**Pernyataan Sikap Tolak Reklamasi  
 Teluk Bena: Segera Batalkan  
 Perpres 51 Tahun 2014**



Pernyataan Sikap Tolak Reklamasi Teluk Bena: Segera Batalkan Perpres 51 Tahun 2014 Rezim Susilo Bambang Yudhoyono pada masa kepemimpinannya ia telah menerbitkan Perpres 51/2014...

☉ Maret 10th, 2015  
**Penolakan terhadap Konsultasi  
 Publik AMDAL**



Terkait dengan adanya undangan dan pengumuman dari

Sumber: ForBali diambil dari <https://www.forbali.org>

**Gambar2. 17 Isi Artikel dalam Website Resmi ForBali**

☉ Februari 17th, 2019  
**Mohon restu Hyang Baruna,  
 ForBALI siap berjuang kembali**



Minggu, 17 Februari 2019, ribuan rakyat yang tergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Bena (ForBali) melakukan aksi persembahyangan dengan tema "Memohon Restu..."

☉ Februari 11th, 2019  
**Lawan Perusakan Baliho BTR!  
 Tatasan Kaja Kembali Pasang  
 Baliho BTR**



Sumber: ForBali diambil dari <https://www.forbali.org>

Kemudian untuk sumber daya konten yang mengisi seluruh dokumentasi-dokumentasi diberbagai kanal sosial media dan juga website resmi milik ForBali sangatlah acak, namun penulis menganalisis bahwa seluruh fotografer dan juga videographer milik

ForBali berasal dari berbagai komunitas dan juga individu-individu yang ikut andil satu suara menolak reklamasi Teluk Benoa di bawah naungan bendera gerakan sosial ForBali.

*“...untuk pembuatan konten media sosial itu banyak sekali fal, dari berbagai komunitas ya, mulai dari videografi dan fotografi seperti itu, itu mereka berdatangan sendirinya secara sukarela untuk membuat kita konten di berbagai sosial media kita, itu setiap minggu orangnya berbeda-beda jadi kita tidak pernah tahu individu-individu tadi \*tertawa\*. Sekarang komunitas A yang mengajukan diri untuk membuat konten video atau fotonya, minggu depannya komunitas B yang bergantian dan begitu seterusnya.” (Wawancara Gede Mertadana pada 21 Februari 2024).*

Hal ini memperlihatkan betapa padat dan solidnya jaringan yang dimiliki ForBali dan menjadi fenomena yang membuktikan bahwa mereka dengan tegas menyatakan betapa berbahayanya proyek reklamasi tersebut bagi pulau yang mereka cintai. Kemudian terdapat pula aktifitas untuk meningkatkan persaudaraan antara jaringan yang tergabung dalam ForBali seperti bersih-bersih, penghijauan dan juga perawatan di lingkungan wilayah pesisir serta mangrove bersama berbagai komunitas seperti WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan juga KEKAL atau Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup. Hal ini menjadi bukti pesisir di Bali sedang tidak baik-baik saja, dengan harapan aksi yang dilakukan ForBali dilihat kembali oleh pemerintah. Selain itu Forbali juga melakukan penggalangan bantuan sosial bersama komunitas jaringan yang tergabung dalam ForBali untuk masyarakat yang terdampak musibah bencana alam pada saat erupsi Gunung Agung dan berbagai bencana lainnya. Forbali melakukan hal tersebut karena merasa Gerakan atau komunitas sosial memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat sipil yang kurang mampu.

Efek setelahnya dari penjaringan khalayak luas di berbagai platform media sosial dan juga website resmi berbuah manis bagi ForBali, semakin banyak yang teredukasi, semakin banyak pula massanya bertambah. Kemudian masyarakat lebih mengetahui kapan dan di mana titik kumpul untuk melakukan berbagai aksi kampanye tentang penolakan

reklamasi Teluk Benoa, dengan adanya ajakan ini masyarakat berbondong-bondong datang untuk menyatukan suara mereka dalam melindungi pulau Bali. Selanjutnya dari banyaknya yang melihat fenomena aksi penolakan tersebut, pemerintah yang pada saat itu sedang terdapat pemilihan calon Gubernur Bali menjadikannya salah satu misi dan mengkampanyekan akan memenangkan suara dari rakyat Bali ketika mereka terpilih nanti.

*“...untuk kolaborasi kita ada dengan beberapa organisasi seperti WALHI, ada juga KEKAL Namanya. Itu selalu kita melakukan kolaborasi dengan melakukan berbagai kegiatan seperti bersih bersih pantai, setelah itu kita menanam pohon atau penghijauan di sekitar pesisir, pembersihan mangrove, intinya yang ada di pesisir selalu kita perbaiki untuk menjadi lebih baik, itu cara kita untuk menyatakan bahwa pesisir kita sedang tidak baik-baik saja. Apalagi jika proyek ini terealisasi pesisir kita ini bisa bertambah buruk lagi kedepannya. ... oke fal, nah yang pertama itu masyarakat awam jadi tereduksi dan lebih tau tentang efek dari reklamasi Teluk Benoa, yang kedua itu lebih banyak lagi dukungan untuk aksi tolak reklamasi, yang ketiga itu keikutsertaan masyarakat yang tidak tergabung dalam forbali, terus juga mereka bisa tau jadwal dan ikut dalam segala kegiatan yang dilakukan dan diadakan forbali, yang keempat tu kasus reklamasi ini kan sudah viral lah ya bisa dikatakan pada saat itu, nah viralnya berita di sosial media ini bisa menarik perhatian pemerintah pusat atas kasus yang terjadi. Dan astungkara fal, harapan kita menjadi kenyataan ketika pada saat itu kita melakukan kampanye blockade di 4 titik itu masanya banyak sekali, terus ada juga artis pas itu yang berorasi ikut berjuang, kalo ga salah Happy Salma ya namanya, seperti itu fal.” (Wawancara Gede Mertadana pada 21 Februari 2024).*

### **2.3 Pro dan Kontra pada Rencana Reklamasi Teluk Benoa.**

Reklamasi Teluk Benoa merupakan topik yang cukup kontroversial di Indonesia, terutama di Bali karena dapat memunculkan berbagai polemik dan permasalahan. Pada proses perencanaan serta pembangunan dalam reklamasi di Teluk Benoa nyatanya juga menuai banyak pro dan kontra di antaranya.

#### **2.3.1 Pro dalam Reklamasi Teluk Benoa:**

1. **Pembangunan Infrastruktur:** Proyek reklamasi memang dapat meningkatkan infrastruktur di sekitar Teluk Benoa, termasuk jalan, fasilitas air, dan listrik, yang dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan maupun warga setempat.
2. **Peningkatan Pariwisata:** Reklamasi dapat meningkatkan jumlah fasilitas pariwisata seperti resor, hotel, wisata air dan berbagai fasilitas wisata lainnya, hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan dari pariwisata dan dampak positifnya dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
3. **Dukungan dari Pemerintah Daerah:** Pemerintah daerah Bali dan sebagian dari masyarakat mendukung reklamasi tersebut sebagai upaya untuk mengembangkan perpuataran ekonomi daerah dan pariwisata yang memang menjadi sumber pendapatan ekonomi terbesar bagi rakyat Bali.

### **2.3.2 Kontra Reklamasi Teluk Benoa:**

1. **Rusaknya Lingkungan:** Reklamasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk kerusakan terumbu karang dan hilangnya habitat alami bagi flora dan fauna termasuk endemis langka yang hanya terdapat di wilayah tersebut.
2. **Identitas Budaya akan Terancam:** Reklamasi dapat mengakibatkan kehilangan identitas budaya lokal karena perubahan dalam struktur dan karakteristik lingkungan. Karena sejatinya Bali juga merupakan tempat untuk wisata budaya dan juga alam.
3. **Menimbulkan Kekhawatiran akan Bencana Alam:** Beberapa orang khawatir bahwa reklamasi Teluk Benoa dapat meningkatkan risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Alasan kuat terjadinya bencana alam karena hutan mangrove menjadi terancam, karena kehadiran hutan mangrove untuk menahan arus ombak air laut yang kuat agar efek yang ditimbulkan tidak signifikan di wilayah pesisir, selain itu mampu menjadi tanggul alami untuk menanggulangi bencana banjir.

4. **Ketidaktransparan Proses Keputusan:** Ada kekhawatiran bahwa proses pengambilan keputusan yang dilayangkan oleh gubernur Bali terkait surat putusan yang diberikan haknya untuk PT TWBI mengenai pemanfaatan lahan di Teluk Benoa terkait reklamasi tidak transparan dan melibatkan kepentingan bisnis yang kuat. Ini juga salah satu yang menjadi alasan kuat bagi ForBali untuk menolak karena ada indikasi keputusan dibuat secara sepihak tanpa memikirkan efek jangka panjang yang ditimbulkan oleh reklamasi tersebut.
5. **Terancamnya Stabilitas Keberlangsungan Hidup:** Dampak negatif dari proyek reklamasi di Teluk Benoa ini memungkinkan untuk turunnya intensitas nelayan untuk mencari ikan dikarenakan banyaknya ikan yang habitatnya hilang oleh reklamasi tersebut karena keberlanjutan ekosistem laut dan mangrove sangat penting bagi kehidupan nelayan-nelayan lokal tersebut.

Saat diberlakukannya proyek reklamasi Teluk Benoa. Masyarakat banyak yang belum teredukasi dan mengetahui akan bahayanya proyek revitalisasi berkedok reklamasi tersebut, namun seiring berjalannya waktu dengan segala strategi yang dilakukan ForBali agar masyarakat melek dengan proyek yang mengancam pulau Bali tersebut. Penolakan dan kontra terhadap proyek tersebut semakin massif (ForBali, 2014).

*“...wah, banyak sekali dampak negatifnya menurut kami dari reklamasi ini. Yang pertama konservasi alam kita rusak, yang kedua ada banjir, yang dimana bali ini sudah sangat dekat dengan air laut ya, jika reklamasi ini terjadi maka dapat dipastikan di seluruh Bali ini akan mengalami banjir terutama di daerah Denpasar akan sangat parah terkena banjirnya. Yang ketiga itu karena terjadinya banjir maka dipastikan akan terjadi bencana alam ya, seperti tanah longsor dan sebagainya. Yang keempat ada terumbu karang kita akan rusak karena terkena dampak reklamasi. Yang kelima ekosistem mangrove kita akan terganggu, terus yang keenam bisa abrasi, terus yang ketujuh itu merusak Kawasan suci agama Hindu di wilayah Bali selatan ya. Itulah beberapa dampak seandainya reklamasi dilaksanakan pada saat itu. ...untuk debit air laut itu sepengetahuan saya sekitar dua meter kalo ga salah dikatakan, itupun dikarenakan pembuatan jalan tol di Bali selatan ini ya yang menyebabkan air laut itu naik, itu aja udah dua meter apalagi kalau pulau reklamasi nanti. ...oh tentu kalau benar-benar dibangun itu rencana reklamasi teluk benoa itu sangat bisa dan*

*sangat mungkin terjadi Denpasar ini bisa tenggelam.”* (Wawancara Gede Mertadana pada 21 Februari 2024).

## BAB 3

### PROSES FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI (ForBALI) DALAM MENGADVOKASI PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA PADA TAHUN 2014-2020

#### 3.1 Conflictual Collective Action.

Conflictual Collective Action yang dimaksudkan dalam mekanisme teori ini adalah saat *Social Movement Actor* terlibat dalam konflik budaya dan politik yang pada akhirnya memiliki tujuan untuk memperjuangkan perubahan dan pertentangan dalam perubahan sosial. Selanjutnya konflik yang dimaksud tadi merupakan hubungan antara *Social Movement Actor* dan juga *Opposition*. Kedua kubu tersebut saling melempar ketidaksetujuan terhadap gagasan atau poin-poin yang mereka angkat sebagai bagian dari prinsip masing-masing kubu dengan cara membentuk sebuah gagasan negative terhadap prinsip mereka satu sama lain, jika salah satu dari kubu tersebut gagasan negatifnya terjadi atau terealisasi, maka ini akan berdampak pada kerusakan aktor dari masing-masing kubu (Mario dan Donatella, 2006). Menilik dari hal tersebut penulis melihat bahwa ForBali memiliki konflik dengan pemerintah yang ingin merealisasikan reklamasi di Teluk Benoa. Penulis juga melihat hal ini sangat bertentangan dengan stabilitas dan juga nilai-nilai kehidupan yang dipegang oleh masyarakat Bali seutuhnya, mulai dari sektor agama, budaya dan adat istiadat, ekonomi, dan juga lingkungan. Kemudian dalam teori *Conflictual Collective Action* diperlukannya aktor gerakan sosial yang dapat membangun koneksi untuk menunjang apa yang mereka suarakan. dalam hal ini penulis melihat bahwa advokasi yang dilakukan ForBali ini sangat mendekatkan diri pada masyarakat dan sangat terbuka bagi seluruh individu maupun kelompok yang ingin terlibat atau ikut andil dalam penolakan reklamasi di Teluk Benoa (Donatella dan Mario, 2006).

Bermula dari ForBali yang mengetahui rencana penyusunan MoU atau perjanjian kerjasama antara TWBI atau Tirta Wahana Bali Internasional dengan Universitas Udayana, alasan TWBI melakukan kerjasama dengan UNUD adalah untuk mengkaji kembali apakah kawasan tersebut layak untuk direklamasi beserta analisa mengenai dampak reklamasi tersebut bagi lingkungan (Rabbani, 2023). Selanjutnya, tepat pada akhir tahun 2012 lalu, perjanjian kerjasama antara PT. TWBI bersama dengan UNUD, UNUD memberikan unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM UNUD untuk melakukan kajian kelayakan beserta analisis dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya PT. TWBI kemudian melakukan kerjasama dengan mengajukan surat permohonan pembuatan keputusan kepada Gubernur Bali dengan nomor surat 009/TWBI/L/XI/2012 pada tanggal 5 November 2012 yang berisi pemanfaatan lahan diwilayah Teluk Benoa yang tercatat seluas kurang lebih 838 hektar. (Rabbani, 2023).

Kemudian setelah seluruh upaya untuk memenuhi persyaratan dan beberapa kajian terkait AMDAL untuk reklamasi Teluk Benoa dan beberapa presentasi yang telah dilakukan oleh LLPM UNUD. Kemudian DPRD Bali memerintahkan LLPM UNUD untuk melakukan kajian kelayakan lebih lanjut dengan nomor surat perintah 660.1/142781/DPRD. setelah kajian lebih lanjut ini dilakukan, barulah surat perintah keputusan untuk pemanfaatan lahan dapat diterbitkan oleh Gubernur Bali untuk TWBI. Kemudian seiring berjalannya waktu LPPM yang mengemban tugas untuk menguji kelayakan lahan tersebut untuk direkonstruksi bagi lingkungan, menemukan ketidak layakan untuk direklamasi karena banyak memiliki dampak yang buruk atau tidak lulus uji Analisis Dampak Lingkungan atau AMDAL (ForBali, 2014). Namun pemerintah tidak dapat menghentikan proyek ini dan harus direalisasikan karena surat putusan yang mutlak tersebut sudah diterbitkan untuk TWBI dan sudah ditanda tangani kontrak konstruksi perencanaan dari perusahaan TWBI. Kemudian setelah pemerintah pusat memberi undan-undang untuk merubah kawasan konservasi menjadi kawasan reklamasi

pada tahun 2014 yang memantapkan jalannya mega proyek tersebut, organisasi ForBali mulai menunjukkan eksistensinya dengan gencar mendesak dan menolak dengan proyek reklamasi di Teluk Benoa (ForBali, 2014).

Pemerintah sebagai oposisi juga melayangkan Surat Keputusan No. 2138/02-C/HK/2012 tentang izin pemanfaatan lahan wilayah perairan Teluk Benoa kepada PT. TWBI yang diturunkan langsung oleh Gubernur Bali tertanggal 26 desember 2012. Dalam hal ini ForBali menolak dengan keras SK yang diterbitkan tersebut, hal ini berkenaan dengan melanggar PERPRES yang sudah ditetapkan dalam peraturan no 45 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi dan dilindungi. Kemudian pemerintah pusat sebagai oposisi juga ikut andil berdasarkan surat putusan yang dibentuk pada rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait PERPRES no 51 tahun 2014 tentang pemanfaatan lahan sebagai penunjang tambahan di sektor ekonomi bagi negara dan wilayah tersebut. Hal ini membentuk persetujuan antara masyarakat dan ForBali dengan Pemerintah dikarenakan PERPRES tersebut tidak berpihak kepada masyarakat Bali seutuhnya. Sebaliknya lebih menguntungkan bagi para investor yang mengekspansi wilayah bisnis mereka di pulau Bali. Penolakan tersebut bersandar pada pencemaran keberlangsungan hidup masyarakat Bali yang berlandaskan *Tri Hita Karana*, mulai dari sektor lingkungan, budaya dan agama, serta adat istiadat yang mereka junjung tinggi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

Setelah melakukan berbagai upaya dan juga kampanye-kampanye yang dilakukan oleh ForBali kubu pemerintah yang menjadi oposisi, oposisi ini tidak ada tanggapan dikarenakan adanya perubahan transisi karena masa habis jabatan. Perubahan transisi masa jabat ini dari gubernur yang sebelumnya adalah Made Mangku Pastika digantikan Wayan Koster, kemudian untuk pemerintah pusat dari sisi kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono yang digantikan oleh Joko Widodo. Alasan pemerintah tidak memberikan tanggapan dan

kebijakan untuk melakukan pembatalan proyek, karena dana dari investor PT. TWBI yang memiliki wewenang untuk melaksanakan proyek reklamasi ini telah diterima oleh pemerintah sebelumnya. Dampak setelahnya proyek reklamasi tersebut sempat terhenti pada tahun 2014 karena massifnya demo yang dilakukan oleh ForBali, namun tak berselang lama pada tahun yang sama proyek reklamasi kembali dilanjutkan. Dari ketidaktransparansi pemberian izin pemanfaatan lahan di Teluk Benoa tersebut yang memicu konflik antara ForBali dan Pemerintah, ForBali membeberkan segala keburukan dari kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah seakan-akan tidak memandang masyarakat Bali dan lingkungan di Bali dalam jangka panjang.

### **3.2 Dense Informal Networks.**

*Dense Informal Networks* merujuk pada struktur hubungan interpersonal yang kuat dan erat antara individu-individu yang terlibat dalam gerakan sosial. Jaringan ini biasanya terbentuk secara organik dan tidak memiliki hirarki formal yang jelas (Donatella dan Mario, 2006). Kekuatan utama dari jaringan ini terletak pada kedekatan personal dan kepercayaan yang tinggi di antara individunya. Dense Informal Networks menurut Donatella Della Porta dan Mario Diani menyatakan sangat mungkin pertukaran informasi dan sumber daya secara cepat dan efisien di antara anggotanya. Hal ini mempermudah mobilisasi SDM, material, dan finansial yang diperlukan untuk mendukung aksi kolektif. Kedekatan personal dalam jaringan informal menciptakan ikatan solidaritas dan kepercayaan yang kuat. Hal ini meningkatkan komitmen dan partisipasi anggota dalam kegiatan gerakan sosial, serta memperkuat ketahanan kelompok terhadap tekanan eksternal. Kemudian informasi dan ide-ide baru dalam gerakan sosial dapat menyebar dengan cepat melalui jaringan yang padat. Ini membantu gerakan sosial untuk tetap dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial dan politik (Donatella dan Mario, 2006). ForBali telah melakukan berbagai upaya untuk terus menolak proyek reklamasi di Teluk Benoa ini. Diantara berbagai strategi dan upaya tersebut ForBali sempat

kembali menggelar mediasi dengan pemerintah pertahun 2019 lalu, namun mediasinya hanya sampai kepada DPRD saja. Dengan harapan wakil rakyat terpilih tersebut mau menyampaikan aspirasi-aspirasi serta keluhan yang diangkat oleh ForBali terkait isu reklamasi. Namun pada saat proses mediasi tersebut kedua kubu baik itu ForBali dan juga DPRD tidak memiliki jalan keluar.

Walaupun mediasi dengan pemerintah belum ada titik terang, mediasi dengan masyarakat selalu berhasil. Upaya ForBali bermediasi bersama masyarakat dengan menyelenggarakan pertemuan berupa edukasi ke masyarakat agar masyarakat lebih paham dengan isu reklamasi ini betapa berbahayanya bagi pulau Bali dari berbagai aspek baik itu ekonomi, sosial, adat istiadat, budaya dan agama, serta lingkungan. Perjuangan ForBali telah berhasil membangun konektivitas bersama masyarakat karena memang berjuang bersama masyarakat Bali seutuhnya adalah tujuan dari ForBali, karena sejatinya ForBali juga terbentuk dari seluruh lapisan masyarakat. Kemudian efek yang ditimbulkan dari mediasi dengan masyarakat adalah semakin bertambah banyaknya individu-individu secara mandiri hadir dan menjadi satu suara dengan ForBali, sehingga perkembangan ForBali sangat meningkat pesat dan sayap jaringannya melebar tidak hanya di dalam kawasan regional saja, namun juga berkembang secara global hingga kancah Internasional.

*Gambar 3. 1 Telaah Sosial Budaya Kawasan Suci Teluk Benoa*



Sumber: ForBali. diambil dari <https://www.forbali.org>

Selain bertatap muka secara langsung dengan masyarakat, ForBali memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan segala bentuk informasi terkait penolakan reklamasi Teluk Benoa kepada khalayak luas. Menurut Boyd dan Ellison, media sosial memiliki kapabilitas unik untuk membangun jaringan sosial yang luas dan beragam, yang memungkinkan pesan dan informasi menjangkau audiens yang lebih luas dengan cepat. Mereka menyatakan bahwa platform ini memungkinkan individu untuk terhubung melintasi batas geografis, sehingga memperluas jangkauan pesan yang disampaikan (Boyd dan Ellison, 2007). Media sosial memainkan peran penting dalam menjangkau audiens yang luas dan memungkinkan penerimaan pesan dengan cepat.

Keunggulan ini menjadikan media sosial sebagai alat yang sangat efektif dalam berbagai konteks, mulai dari pemasaran dan bisnis hingga gerakan sosial dan kampanye politik. Dengan memanfaatkan kekuatan media sosial, individu dan organisasi dapat menyampaikan pesan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Media sosial telah terbukti efektif dalam gerakan sosial dan kampanye politik, seperti yang terlihat dalam kasus penolakan reklamasi Teluk Benoa ini, ForBali dengan tepat pada sasarannya menargetkan audiens secara luas untuk menerima pesan-pesan dan membagi aktifitasnya pada khalayak umum dan masyarakat global. Pesan-pesan dan informasi terkait dapat disebarkan dengan cepat, menggalang dukungan massa dalam waktu singkat.

Keberhasilan ForBali dalam menjaring seluruh elemen melalui berbagai media terlihat pada didapatnya dukungan dari berbagai lembaga seperti Greenpeace, WALHI, KEKAL, dan lembaga lainnya memiliki titik terang. Greenpeace yang merupakan NGO dan organisasi berskala internasional mendengar suara ForBali yang menolak reklamasi di Teluk Benoa. Pada tahun 2018 lalu, Greenpeace, WALHI dan juga ForBali bersama-sama melakukan aksi protes berupa kampanye non-verbal dengan membentangkan spanduk

penolakan reklamasi di Teluk Benoa, dan ini memiliki efek penjaringan berbagai individu dan juga kelompok dari berbagai elemen semakin bertambah lagi.

*Gambar 3.2 Aksi Greenpeace*



Sumber: Greenpeace, diambil dari <https://www.greenpeace.org>

Kemudian efek setelahnya dari penjaringan khalayak luas di berbagai platform media sosial dan juga website resmi berbuah manis bagi ForBali, semakin banyak yang teredukasi, semakin banyak pula massanya bertambah. Kemudian masyarakat lebih mengetahui kapan dan di mana titik kumpul untuk melakukan berbagai aksi kampanye tentang penolakan reklamasi Teluk Benoa, dengan adanya ajakan ini masyarakat berbondong-bondong datang untuk menyatukan suara mereka dalam melindungi pulau Bali. Selanjutnya dari banyaknya yang melihat fenomena aksi penolakan tersebut, pemerintah yang pada saat itu sedang terdapat pemilihan calon Gubernur Bali menjadikannya salah satu misi dan mengkampanyekan akan memenangkan suara dari rakyat Bali dengan menghentikan rencana proyek reklamasi ketika mereka terpilih nanti.

### **3.3 Collective Identity.**

*Collective Identity* menurut Donatella Della Porta dan Mario Diani merupakan konsep yang menggambarkan bagaimana individu-individu dalam suatu kelompok sosial

mengembangkan rasa kesatuan dan kebersamaan menjadi satu identitas yang menjadi pembeda dari kelompok lainnya. Dalam konteks gerakan sosial, identitas kolektif menjadi faktor penting dalam memahami bagaimana dan mengapa individu bersatu untuk memperjuangkan tujuan bersama. Kemudian *Collective Identity* terbentuk melalui berbagai proses interaksi antara individu yang tergabung ke dalam gerakan atau kelompok tersebut. Interaksi ini melibatkan diskusi, debat, dan kegiatan bersama yang membantu membangun konektivitas dan pemahaman bersama mengenai tujuan serta nilai-nilai yang mereka pegang teguh (Donatella dan Mario, 2006). Lebih lanjut lagi *Collective Identity* berperan dalam meningkatkan motivasi dan komitmen anggota kelompok untuk terlibat dalam aksi. Pola pergerakan inilah yang memberikan rasa bahwa tujuan dan makna yang mereka pegang itu tetap kuat.

Kemudian pergerakan mereka mampu mendorong anggota untuk bertindak demi kepentingan kelompok karena perlu diketahui bahwa di dalam gerakan sosial menurut *Collective Identity* ini sangat berpegang pada tujuan dan nilai yang mereka pandang sebuah kebaikan dan dirasa pantas untuk diperjuangkan bersama. Sehingga faktor eksternal seperti tekanan dari kelompok lain atau oposisi tidak terlalu berpengaruh atau bisa melakukan perlawanan selama mereka tetap berpegang teguh pada apa yang mereka jadikan tujuan. Respons eksternal ini bisa menjadi acuan dalam memperkuat keterikatan atau solidaritas antara masing-masing anggota di dalam gerakan sosial tersebut. Lebih lanjut lagi *Collective Identity* bukanlah suatu gerakan yang statis, gerakan tersebut dapat berubah seiring berjalan dan perkembangan waktu. Perubahan yang dimaksud bisa berkembang dari faktor massanya atau bergeser sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok (Donatella dan Mario, 2006).

Dalam Collective Identity menurut Donatella Della Porta, terdapat beberapa komponen penting terbangunnya sebuah hubungan dalam gerakan sosial tersebut, di antaranya.

### **3.3.1 Emotional Attachment.**

Keterikatan Emosional yang dibangun ForBali sangatlah positif, untuk membangun rasa solidaritas antar individu dan komunitasnya. ForBali mengadakan event-event untuk menyatukan seluruh individunya dengan berbagai kegiatan sosial seperti, bersih-bersih lingkungan. Event kebersihan yang diadakan ForBali ini diadakan setiap minggu dan dapat diikuti oleh siapa saja yang ingin mengikutinya baik itu komunitas dan individu yang tergabung dalam jaringan ForBali atau individu dan kelompok eksternal.

*Gambar 3. 3 Komunitas Jaringan ForBali “Leak Sanur” Melakukan Beach Clean Up.*



Sumber: ForBali diambil dari <https://www.forbali.org>

**Gambar 3. 4 Kegiatan Beach Clean Up “Leak Sanur”**



Sumber: ForBali diambil dari <https://www.forbali.org>

*Gambar 3. 5 Masyarakat Tanjung Benoa Melakukan Bersih-Bersih di Pulau Pudut*



Sumber: ForBali diambil dari <https://www.forbali.org>

Selanjutnya penyaluran bantuan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Penyaluran yang dilakukan ForBali ini bisa berupa bantuan logistic dan juga tempat tinggal darurat berfokus pada masyarakat yang terkena dampak dari berbagai bencana. Dan dalam kegiatan ini siapapun boleh ikut andil di dalamnya serta kegiatan ini dinilai mampu untuk memperkuat solidaritas dan konektivitas antara komunitas dalam jaringan ForBali.

**Gambar 3. 6 Penyaluran Bantuan Logistik Kepada Korban Erupsi Gunung Agung**



Sumber: ForBali diambil dari <https://www.forbali.org>

**Gambar 3. 7 Penyaluran Bantuan Logistik untuk Masyarakat Korban Erupsi Gunung Semeru**



Sumber: <https://www.balitopnews.com/berita/7159>

Selanjutnya masyarakat Bali dikenal dengan kekentalan akan budaya dan seninya, jiwa seni mereka sangatlah hidup dan bahkan seni dapat mempersatukan mereka. ForBali kerap mengadakan berbagai aktivitas seni tradisional dan seni modern untuk menyalurkan bakat seniman lokal, kegiatan pagelaran seni ini dapat menjadi sarana atau media hiburan bagi masyarakat dan menyatukan seluruh komunitas kreatif di Bali.

*Gambar 3. 8 Penampilan Tari Barong oleh seniman lokal*



Sumber: ForBali diambil dari <https://www.forbali.org>

*Gambar 3. 9 Konser Svara Bumi sebagai wadah penyatuan komunitas dan seniman Bali*



Sumber: ForBali diambil dari <https://www.forbali.org>

serta beragam kegiatan untuk membangun konektivitas hubungan antar komunitas dan jaringan yang harmonis dalam jaringan ForBali.

*Gambar 3. 10 Komunitas Perempuan ForBali Touring dengan membawa pesan Penolakan Reklamasi Teluk Benoa*



Sumber: ForBali diambil dari <https://www.forbali.org>

### 3.3.2 Symbols.

Atribut merupakan sebuah identitas yang mempresentasikan sebuah gerakan.

ForBali juga memiliki Atribut atau simbolik khusus untuk mengidentifikasi dirinya sebagai bentuk perlawanan dan perlindungan bagi pulau Bali. Dengan menggunakan logo kepalan tangan kiri yang menjadi simbolik perlawanan dari masyarakat, berlatar belakang pulau Bali yang menjadi tanah yang patut mereka lindungi dan perjuangkan dari proyek reklamasi Teluk Benoa, serta logo berwarna merah yang menjadi arti bahwa gerakan ini berani melakukan apapun untuk berjuang dalam melindungi pulau Bali. Kemudian untuk acara kampanye sendiri gerakan ForBali biasa menggunakan baju adat bebas, sopan dan rapih.

*Gambar 3. 11 Contoh Pakaian Adat yang digunakan dalam aksi penolakan*



Sumber: BBC/ <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50010898>

Dengan *Payas Alit* baik laki-laki yang mengenakan *Udeng*, Kemeja putih atau Kaos ForBali Tolak Reklamasi dan *Kamen*, maupun perempuannya yang hanya menggunakan kaos atau kemeja dan *Kamen*. Ini merupakan simbolik bahwa segala bentuk penolakan yang dilakukan oleh ForBali adalah suatu keseriusan dan juga kesakralan untuk menjaga pulau Bali. ForBali memang memiliki baju identitas dengan logo pulau Bali dan kepalan tangan berwarna merah lengkap dengan tulisan Bali Tolak Reklamasi, namun tidak diwajibkan untuk memilikinya, akan tetapi semua individu boleh untuk membelinya karena baju tersebut adalah bentuk dukungan atau salah satu sumber dana bagi ForBali untuk kebutuhan kampanye dan juga event-event lainnya.

*Gambar 3. 12 Pakaian Adat yang menjadi pakaian pilihan untuk menolak Reklamasi Teluk Benoa*



Sumber: ForBali diambil dari <https://www.forbali.org>

### **3.3.3 Common Purpose and Shared Commitment.**

ForBali benar-benar memiliki nilai dan tujuan untuk memenangkan hak rakyat Bali untuk tidak merealisasikan reklamasi Teluk Benoa. Seluruh jaringannya bersama-sama ikut andil dalam melakukan berbagai upaya untuk melakukan penolakan mulai dari edukasi dan juga kampanye-kampanye terkait reklamasi di Teluk Benoa di sosial media, antar komunitas ke komunitas, dan juga antar individu ke individu tanpa memandang apapun latar belakang mereka yang pada intinya semua dilakukan demi kepentingan suara untuk membatalkan proyek reklamasi ini, segala cara diupayakan untuk mengintervensi pemerintah. Kemudian siapapun dapat mengakses segala informasi untuk mengetahui apa saja kegiatan yang

dilakukan ForBali dan ini menjadi sebuah keuntungan untuk ForBali dalam mendapatkan suara untuk meraih tujuannya karena masyarakat yang telah mengetahui permasalahan juga akan satu suara dengan ForBali. Dari upaya-upaya yang sudah terealisasikan ini terciptalah fundamental yang kuat bagi ForBali. Mereka juga kerap kali membagikan dampak dan efektivitas yang terjadi jika proyek ini direalisasikan, ini dapat menjadi acuan bahwa ForBali harus menang apapun caranya untuk dapat membatalkan proyek ini.

Dari upaya-upaya yang sudah terealisasikan ini terciptalah fundamental yang kuat bagi ForBali. kemudian beberapa goals yang selalu mereka pegang teguh adalah, menuntut transparansi dari pemerintah dan pihak TWBI dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek besar, mengajak masyarakat untuk aktif ikut andil dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan sosial mereka, menolak proyek reklamasi yang dianggap merusak ekosistem Teluk Benoa dan mengancam kelestarian lingkungan hidup di Bali, mempertahankan hak-hak masyarakat adat dan lokal yang hidup di sekitar Teluk Benoa, mencegah dampak sosial negatif dari reklamasi yang bisa mengganggu mata pencaharian masyarakat, seperti nelayan dan petani, dan juga mendorong pelestarian hutan mangrove, terumbu karang, dan habitat laut yang ada di Teluk Benoa.

Kemudian untuk nilai-nilai yang selalu mereka pegang di antaranya, memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di Bali harus berkelanjutan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada. mendorong pembangunan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, menghormati dan melestarikan budaya serta kearifan lokal Bali dalam menjaga lingkungan, mengedepankan nilai-nilai tradisional Bali yang selaras dengan alam, menjalin solidaritas antar warga Bali dan juga dengan gerakan lingkungan di tingkat nasional maupun internasional, membangun rasa kebersamaan dan gotong royong dalam perjuangan menolak reklamasi. Dengan memegang seluruh tujuan dan nilai ForBali tetap kokoh dan solid untuk memenangkan pembatalan proyek reklamasi Teluk Benoa. Dan diketahui pula bahwa

seluruh elemen yang tergabung dalam ForBali sehati dan juga sejalan untuk memenangkan pembatalan proyek karena dampak negative yang ditimbulkan bagi stabilitas kehidupan dan adat istiadat di Bali.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini mengkaji dan mencoba menganalisa advokasi yang dilakukan oleh ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) dalam mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah secara sepihak dengan tidak melihat dampak keberlanjutan dari proyek tersebut dengan menolak reklamasi Teluk Benoa pada tahun 2014-2020 dengan menggunakan pendekatan teori Gerakan Sosial dari Donatella della Porta dan Mario Diani. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ForBali berhasil membangun struktur organisasi yang kuat dan saling terikat atau terhubung satu sama lain. Jaringan yang terbentuk meliputi berbagai elemen masyarakat, mulai dari masyarakat adat, nelayan, seniman, hingga akademisi dan aktivis lingkungan. ForBali juga menjalin hubungan yang solid dengan berbagai organisasi baik itu nasional dan internasional, hal ini sangat menentukan kokoh dan solidnya posisi ForBali sebagai gerakan sosial. Dalam upaya advokasinya, ForBali memanfaatkan berbagai sumber daya, baik itu sumber daya manusia, finansial, dan juga informasi.

Kemudian ForBali juga melakukan penggalangan dana melalui donasi publik, penjualan-penjualan merchandise, dan mengorganisir acara-acara budaya dan seni, serta kampanye media sosial yang efektif, dan ini menjadi kunci dalam mempertahankan momentum gerakan. Keterlibatan tokoh-tokoh publik dan artis Bali turut membantu dalam menarik perhatian media dan publik yang lebih luas. Kemudian ForBali secara efektif menggunakan framing untuk membangun narasi yang kuat mengenai dampak negatif reklamasi Teluk Benoa. Narasi ini mencakup isu-isu lingkungan, hak-hak masyarakat adat, dan keberlanjutan sosial serta ekonomi. ForBali berhasil mengomunikasikan bahwa reklamasi

akan merusak ekosistem Teluk Benoa, mengancam mata pencaharian nelayan, serta melanggar kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat Bali.

Selanjutnya ForBali menerapkan berbagai strategi dan upaya dalam advokasinya, termasuk demonstrasi damai, aksi simbolis, dan kampanye online. Mereka juga mengajukan petisi, menggugat proyek reklamasi melalui jalur hukum, serta melakukan lobi politik untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan nasional. Upaya dan berbagai strategi ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas ForBali dalam menghadapi tantangan yang ada di hadapan mereka. Kemudian advokasi ForBali telah terlihat berhasil menunda dan mempersulit pelaksanaan proyek reklamasi Teluk Benoa. Sehingga pada akhirnya ForBali memenangkan pembatalan tersebut dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 46/KEPMEN-KP/2019 yang berisi penetapan Teluk Benoa di perairan provinsi Bali sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Dan dari penerbitan surat keputusan resmi dari Menteri Kelautan tersebut merupakan simbolis kemenangan bagi rakyat Bali setelah enam tahun berjuang bersama-sama.

#### **4.2 Rekomendasi Penelitian.**

Penelitian ini memiliki fokus pada bagaimana upaya ForBali dalam mengadvokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa terhadap pemerintah yang membentuk keputusan tersebut. Dengan begitu kiranya untuk penelitian selanjutnya penulis merekomendasikan bisa membahas lanjutan penelitian ini dalam melihat peran pemerintah sebagai pembuat keputusan terkait reklamasi di Teluk Benoa dengan menggunakan teori dari Diplomasi Publik, teori dalam *Decision Making*, dan teori dalam ilmu Hubungan Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anarki, Fransiska Xaveriana Tamu Rambu, I. Ketut Putra Erawan, AA Sagung Mirah, and Mahaswari Jayanthi Mertha. "Tentang Izin Rencana Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa “."
- Anam, Khairil, Lala M. Kolopaking, and Rilus A. Kinseng. "Efektivitas sosial media dalam gerakan sosial penolakan reklamasi teluk jakarta, indonesia." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 8, no. 01 (2020): 64-81.
- Ani Soetjipto, Arivia Tri Dara Yuliestiana, Desak Putu Sinta Suryani, Dias Khadijah Kinanthi, Cazadira Fediva Tamzil, Puti Parameswari, Rachmayani, dan Amira Waworuntu. “*Transnasionalisme: Peran dan Aktor non-Negara dalam Hubungan Internasional.*” Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Edisi 1, Cetakan 1. (2018): 86-91.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. “Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali 2018.” BAPPEDA, (2017) : 15-21.
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Wisman ke Bali Tahun 2017 Mencapai 4,98 Juta Orang." BPS - Statistics Indonesia, 19 Jan. 2018, <https://www.bps.go.id/news/2018/01/19/1459/jumlah-wisman-ke-bali-tahun-2017-mencapai-498-juta-orang.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik pariwisata Indonesia 2018. <https://www.bps.go.id/publication/2018/11/19/8b722b5fb6dfeaad6e31b91b/statistik-pariwisata-indonesia-2018.html>

Boyd, Danah M., and Nicole B. Ellison. "Social network sites: Definition, history, and scholarship." *Journal of computer-mediated Communication* 13, no. 1 (2007): 210-230.

Donatella Della Porta, Mario Diani. "Social Movements An Introduction." Blackwell Publishing. (2006): 5-21.

ForBali. "Tentang ForBali." 2013. diakses pada 7 Maret 2023 dan 24 Desember 2023, <https://www.forbali.org/id/tentang-kami/>

ForBali. "Aksi akbar ForBALI Tolak Reklamasi Berkedok Revitalisasi Teluk Benoa" Posted on 31 December, 2014. <https://youtu.be/zeOY1hFqArg?si=1SOSd7DQB0so4h3L> diakses pada 12 Agustus 2023.

ForBali. "NAWA SANGA BALI TOLAK REKLAMASI ART EVENT 2015" Posted on 16 December, 2015. [https://youtu.be/8u8QXeq3Xj8?si=0XS3nwIgNaA\\_Hxti](https://youtu.be/8u8QXeq3Xj8?si=0XS3nwIgNaA_Hxti) diakses pada 13 Agustus 2023.

ForBALI. "Surat Kabar ForBALI," 2014. Diakses pada 7 Maret 2023, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhuJW0rPr-AhVlbnwGHQfpBLMQFnoECDIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.forbali.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2FForBALI-Newsletter-2.pdf&usg=AOvVaw2GIX3Vkt5MANxfyMc\\_kcnh](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhuJW0rPr-AhVlbnwGHQfpBLMQFnoECDIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.forbali.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2FForBALI-Newsletter-2.pdf&usg=AOvVaw2GIX3Vkt5MANxfyMc_kcnh)

ForBALI, 2015. "Pernyataan Sikap Tolak Reklamasi Teluk Benoa Segera Batalkan Perpres 51 Tahun 2014". <https://www.forbali.org/id/pernyataan-sikap-tolak-reklamasi-teluk-benoa-segera-batalkan-perpres-51-tahun-2014/>, diakses pada 16 April 2024.

ForBALI. 2017. "Lawan Penurunan Paksa Baliho Tolak Reklamasi, Desa Adat Dirikan Baliho Baru Secara Serentak". <https://www.forbali.org/id/lawan-penurunan-paksa-baliho-tolak-reklamasi-desa-adat-dirikan-baliho-baru-secara-serentak/> , diakses pada 29 April 2023.

Geraldine, Abraham, Muhammad Ali Azhar, and Piers Andreas Noak. "Strategi Gerakan Sosial Baru dalam Kampanye Pengurangan Sampah Plastik di Bali." *E-Jurnal Politika* (2021).

Handadari, Asri Setianingrum Kenyo, Tri Edhi Budhi Soesilo, and Widodo Setiyo Pranowo. "Indeks keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir di lokasi reklamasi Teluk Benoa Bali." *Jurnal Kelautan Nasional* 13, no. 3 (2018): 121-13

Ivariana, Tita Dwi. "Social media lifestyle as the new era of traveling promotion, prosiding Hospitality and tourism development research and practice." *Jakarta: AITTEI* (2013).

Kompas, "Jika Perpres 51 Belum Dicaput, Teluk Benoa Dinilai Masih Belum Aman" 2019. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizkeD5xveAAxU0SGwGHWipBiEQFnoECBEQAQ&url=https%3A%2F%2Fregional.kompas.com%2Fread%2F2019%2F10%2F11%2F14184831%2Fjika-perpres-51-belum-dicaput-teluk-benoa-dinilai-masih-belum-aman%3Fpage%3Dall&usg=AOvVaw1KnN18dAEzM-TKcRkWAWHH&opi=89978449> diakses pada 14 Agustus 2023.

Kompas, "Warga Kembali Demo, Sebut Teluk Benoa Belum Aman dari Ancaman Reklamasi" 2020. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiv7DqifmAAxWEzTgGHZe->

[Cf8QFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fregional.kompas.com%2Fread%2F2020%2F01%2F27%2F10533631%2Fwarga-kembali-demo-sebut-teluk-benoa-belum-aman-dari-ancaman-reklamasi&usg=AOvVaw3R6w-EHh3ABxEIq3ye6-QB&opi=89978449](https://www.kompas.com/read/2020/01/27/10533631/warga-kembali-demo-sebut-teluk-benoa-belum-aman-dari-ancaman-reklamasi&usg=AOvVaw3R6w-EHh3ABxEIq3ye6-QB&opi=89978449) diakses pada 14 Agustus 2023.

Mahardika, Reza Putra. "Rencana Reklamasi Teluk Benoa Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Dan Tabanan." PhD diss., Brawijaya University, 2016.

Manuel London, "Understanding Social Advocacy." *Journal of Management Development* 29, no 3 (2010).

Metro Bali. "Reklamasi Teluk Benoa Untuk Masa Depan Bali". 5 Agustus 2013. <https://metroballi.com/reklamasi-teluk-benoa-untuk-masa-depan-bali/>. Diakses pada 20 Desember 2023.

Mongabay. "Aksi Tolak Reklamasi dan Dorongan Teluk Benoa Sebagai Kawasan Suci." 28 Oktober 2015. <https://www.mongabay.co.id/2015/10/28/aksi-tolak-reklamasi-dan-dorongan-teluk-benoa-sebagai-kawasan-suci/>. Diakses pada 21 Desember 2023.

Nahar, Lucky Dwi. "Kronisme Kapital Dalam Investasi Proyek Reklamasi Teluk Benoa Di Bali." PhD diss., UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2019.

Nugraha, AA Widya Surya Widya. "PENTINGNYA LITERASI PARIWISATA DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE TOURISM DI BALI." *Jurnal Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan (JIPKA)* 2022. 2, no. 1: 100-119.

Pebriyanti, Ni Nengah Susi Laksmi, Sukma Sushanti, and Ni Wayan Rainy Priadarsini.

"UPAYA GREENPEACE DALAM MENDUKUNG FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI TELUK BENOA (FORBALI) TAHUN 2012-2018."

Rabbani, H. 2023. "Suara publik dalam kasus alih fungsi lahan di Bali: Studi kasus reklamasi Teluk Benoa." Dalam Lan, T. J. (Ed.), *Demokrasi di tingkat lokal: Mendorong proses deliberasi* halaman 41–71. Penerbit BRIN (2023).

Rahmawati, D. 2020. Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Aktivis Lingkungan Berorasi di Depan DPRD Bali. diakses pada 6 Maret 2023, dari Tirto.id. <https://tirto.id/aksi-tolak-reklamasi-teluk-benoa-aktivis-lingkungan-berorasi-di-depan-dprd-bali-fFIQ>

Samodra, G., Y. A. Yusuf, dan S. S. Soemarto. "Reklamasi Lahan Terdegradasi untuk Pertanian di DAS Way Seputih, Lampung Tengah." *Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan* 32, no. 2 (2013): 87-95.

Sofyan, Nur. "Communication Strategies of the Provincial Government of Bali for a Benoa Bay Reclamation Conflict Resolution in 2016-2017." In *Third International Conference on Sustainable Innovation 2019–Humanity, Education and Social Sciences (IcoSIHESS 2019)*, pp. 479-483. Atlantis Press, 2019.

Suantika, Wayan. "Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Kapitalisme Global: Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa Bali Tahun 2012-2013." *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2015).

Sumardjo, *Reklamasi Tambang*. Jakarta: Penerbit Kanisius, 1995.

Tribun Bali, "ForBali, Gagalnya Reklamasi Teluk Benoa Adalah Kemenangan Rakyat!". 2018. <https://bali.tribunnews.com/2018/08/27/forbali-gagalnya-reklamasi-teluk-benoa-adalah-kemenangan-rakyat> diakses pada 13 Agustus 2023.

Vali, Tri Anggara. *Gerakan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Dalam Penolakan Reklamasi Teluk Benoa Nusa Dua, Bali*. Diss. Universitas Airlangga, 2017.

Wahidmurni, Wahidmurni. "Pemaparan metode penelitian kualitatif." (2017).

Wiranata, I. M. A., & Siahaan, H. (2019). Konstruksi Identitas Kolektif Warga Desa Adat dalam Gerakan Tolak Reklamasi Teluk Benoa di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 9(2), 407-428.

Wiranata, I. Made Anom. "Gerakan Warga Desa Adat Di Bali Menentang Reklamasi Teluk Benoa: Studi Fenomenologi Hermeneutik Dalam Perspektif Gerakan Sosial Baru." PhD diss., UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.